PERAN PBB MELALUI UNSDF DALAM MENGUPAYAKAN KESETARAAN GENDER DI PAKISTAN TAHUN 2018-2022

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

PRAJNA DIVA AZZAHRA

21323131

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERAN PBB MELALUI UNSDF DALAM MENGUPAYAKAN

KESETARAAN GENDER DI PAKISTAN TAHUN 2018-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

PRAJNA DIVA AZZAHRA

21323131

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PBB MELALUI UNSDF DALAM MENGUPAYAKAN

KESETARAAN GENDER DI PAKISTAN TAHUN 2018-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

12 Maret 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
3	Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

12 Maret 2025



Prajna Diva Azzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR SINGKATAN ix

ABSTRAK xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Cakupan penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 7

1.6 Kerangka Pemikiran 10

1.6.1 Enforcement Approach 11

1.6.2 Management Approach 12

1.6.3 Normative Approach 13

1.7 Argumen Sementara 14

1.8 Metode Penelitian 15

1.8.1 Jenis Penelitian 15

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 16

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16

1.8.4 Proses Penelitian 16

1.9 Sistematika Pembahasan 17

BAB 2 PBB DAN KESENJANGAN GENDER PADA PEREMPUAN DI PAKISTAN 19

2.1 Kesenjangan Gender di Pakistan 19

2.1.1 Gender Based Violence 20

2.1.2 Bidang Ekonomi 22

2.1.3 Bidang Kesehatan 23

2.1.4 Bidang Pendidikan 24

2.1.5 Bidang Politik 26

2.2. *ONE UN Programme* di Pakistan 28

2.2.1 PBB, DaO, dan One UN Programme 28

2.2.2 One UN Programme I dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan 32

2.2.3 One UN Programme II dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan 33

BAB 3 PERAN PBB MELALUI UNSDF DALAM MENGUPAYAKAN KESETARAAN GENDER DI PAKISTAN MELALUI PENDEKATAN MANAJERIAL OLEH JUTTA JOACHIM, BOB REINALDI, DAN BERTJAN VERBEEK 36

3.1 Peran *Monitoring* PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan Tahun 2018-2022 36

3.1.1 Monitoring Berdasarkan Laporan Negara 36

3.1.2 Monitoring Berdasarkan Inspeksi 39

3.1.3 Monitoring Berdasarkan Laporan NGO 41

3.2 Peran *Capacity Building and Problem Solving* PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan Tahun 2018-2022 44

3.2.1 Capacity Building and Problem Solving Melalui Saran Ahli dari PBB 45

3.2.2 Capacity Building and Problem Solving Melalui Interpretasi Aturan 46

3.2.3 Capacity Building and Problem Solving Melalui Bantuan Teknis 49

BAB 4 KESIMPULAN 53

4.1 Kesimpulan 53

4.2 Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Kesenjangan Gender Pakistan pada Tahun 2012-2022 1
Tabel 2. Pendekatan dalam Konsep Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek 10
Tabel 3. Persentase Pengangguran di Pakistan Berdasarkan Gender 22
Tabel 4. Indeks Tingkat Kelahiran di Pakistan 23
Tabel 5. Persentase Partisipasi Sekolah dalam Setiap Tingkat Berdasarkan Gender 25
Tabel 6. Persentase Literasi di Pakistan Berdasarkan Gender 26
Tabel 7. Persentase Pemegang Posisi Menteri di Pakistan Berdasarkan Gender 27
Tabel 8. Peran PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan tahun 2018-2022 melalui Pendekatan Manajerial 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Konsep UNSDF 30

DAFTAR SINGKATAN

ALP	: Alternative Learning Pathways
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CMAM	: The Community Management of Acute Malnutrition
CNC	: Computerized National Identity Cards
DaO	: Delivering as One
ESP	: Essential Services Package
FAO	: Food and Agriculture Organization of the United Nations
GBV	: Gender Based Violence
GEWE	: Gender Equality and Women's Empowerment
LHRLA	: Lawyers for Human Rights and Legal Aid
NCSW	: National Commission on the Status of Women
NGO	: Non-Governmental Organization
NPA	: National Plan of Action
NSER	: National Socio-Economic Registry
OP	: One United Nations Programme
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SGDs	: Sustainable Development Goals
SRH	: Sexual and reproductive health
SSDO	: Sustainable Social Development Organisation
TEVTA	: Technical Education & Vocational Training Authority
UNDAF	: United Nations Development Assistance Framework
UNDP	: United Nations Development Programme
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNJP	: United Nations Joint Programme
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS : United Nations Office for Project Services

UNSDF : United Nations Sustainable Development Framework for Pakistan

WHO : World Health Organization

WPC : Women's Parliamentary Caucus

ABSTRAK

Pakistan menjadi salah satu negara yang memiliki persentase tinggi terhadap isu kesenjangan gender. Diskriminasi yang terjadi kepada perempuan di Pakistan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan dibuktikan dengan rendahnya peringkat Pakistan pada *Global Gender Report* pada tahun 2018 hingga 2022. Maka dengan itu, PBB melalui UNSDF sebagai rencana strategis jangka menengah membantu mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan dengan tujuan mewujudkan Visi Pakistan 2025 dan SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan organisasi internasional melalui pendekatan manajerial. Melalui pendekatan manajerial PBB melakukan metode pemantauan serta pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah. PBB melalui UNSDF melakukan metode pemantauan dengan berdasarkan pada laporan negara, inspeksi, dan laporan NGO. Selain itu, PBB melalui UNSDF juga melakukan pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah melalui saran ahli, interpretasi aturan, dan bantuan teknis kepada Negara Pakistan selama tahun 2018 hingga 2022.

Kata-kata kunci: Kesetaraan Gender, Pakistan, PBB, UNSDF, Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional.

ABSTRACT

Pakistan is one of the countries with a high percentage of gender inequality issues. Discrimination against women in Pakistan occurs in various aspects of life, as evidenced by Pakistan's low ranking in the Global Gender Report for 2018-2022. Therefore, the United Nations, through the UNSDF as a medium-term strategic plan, is supporting the fight for gender equality in Pakistan with the aim of realizing Pakistan's Vision 2025 and the SDGs. This study aims to analyze the role of the UN through UNSDF in fighting for gender equality in Pakistan from 2018 to 2022, using the concept of international organizations and policy implementation through a managerial approach. Through the managerial approach, the UN conducts monitoring methods as well as capacity building and problem solving. The UN through UNSDF conducts monitoring methods based on country reports, inspections, and NGO reports. Besides that, the UN through UNSDF also conducts capacity building and problem solving through expert advice, rule interpretation, and technical assistance to the state of Pakistan from 2018 to 2022.

***Keywords**: Gender Equality, Pakistan, UN, UNSDF, International Organizations and Policy Implementation.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki persentase tinggi terhadap isu diskriminasi perempuan di negaranya adalah Pakistan. Diskriminasi berbasis gender yang terjadi di Pakistan tidak hanya terdiri dari kekerasan yang melibatkan fisik, namun juga sudah melibatkan budaya maupun adat istiadat (seperti perkawinan paksa) dan kekerasan secara struktural (Azizah and Rahmawati 2022, 1). Pengimplementasian praktik hukum ini semakin diperparah dengan institusi yang menekankan pada budaya tradisional dan patriarki dalam pelaksanaannya (Putu, Mangku, and Yuliartini 2022, 88). Diskriminasi yang kerap terjadi kepada perempuan menjadikan Pakistan sebagai negara yang tergolong tinggi dalam kesenjangan antara perempuan dan laki-lakinya. Kesenjangan ini terbukti pada laporan mengenai kesenjangan gender yaitu *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.

Tabel 1. Laporan Kesenjangan Gender Pakistan pada Tahun 2012-2022

Tahun	Skor	Peringkat
2012	0,54	134/135
2013	0,54	135/136
2014	0,55	141/142
2015	0,55	144/145

2016	0,55	143/144
2017	0,55	143/144
2018	0,55	148/149
2020	0,56	151/153
2021	0,55	153/156
2022	0,56	145/146

Sumber: World Economic Forum (2012-2022)

Berdasarkan *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan World Economic Forum pada tahun 2012 hingga 2022 Pakistan selalu berada di peringkat 2 terbawah dari seluruh negara, terkecuali pada tahun 2020 yang berhasil naik menjadi peringkat 3 terbawah dan tahun 2021 yang menjadi peringkat 4 terbawah (World Economic Forum 2019; 2021). Skor yang dimiliki Pakistan juga berada pada angka yang stabil yaitu berkisar pada 0,54-0,56. Skor ini berkisar dari angka 0 hingga 1 yang menunjukkan bila negara mendapatkan poin indeks 1 maka negara tersebut tidak memiliki kesenjangan gender. Dengan skor dan peringkat rendah yang dimiliki oleh Negara Pakistan, maka isu ini menjadi suatu hal mendesak yang harus segera diselesaikan.

Pakistan merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Maret 1996 yang berarti Pakistan telah sepakat untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan menegakkan hak asasi perempuan kepada seluruh perempuan di

dunia, khususnya di negaranya sendiri (Putu, Mangku, and Yuliartini 2022, 87). Namun, meskipun Pemerintah Pakistan telah melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai kekerasan dan diskriminasi yang diderita oleh perempuan di Pakistan, masih banyak kendala yang terjadi dan membuktikan bahwa Pemerintah Pakistan belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga mengakibatkan turunnya bantuan dari berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah United Nations (UN) atau yang biasa dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pakistan telah menjadi bagian dari negara keanggotaan PBB sejak tahun 1947 dan PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Pakistan dalam menanggapi kebutuhan pembangunan dan komitmen globalnya seputar SDGs (*Sustainable Development Goals*) (United Nations Pakistan 2020, 4). Pakistan sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap Agenda 2030 demi Pembangunan Berkelanjutan dengan menggunakan 17 poin SDGs sebagai agenda pembangunan nasionalnya melalui Resolusi Majelis Nasional yang meraih suara bulat pada tahun 2016 (United Nations Pakistan, n.d.). Dengan itu, maka PBB dan Pemerintah Pakistan bekerja sama dalam mewujudkan prioritas nasional yang dituangkan dalam Visi Pakistan 2025 dan lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang dibingkai oleh Agenda 2030 melalui *United Nations Sustainable Development Framework for Pakistan* (UNSDF) atau yang dapat disebut juga One United Nations Programme III (OP III) (United Nations Pakistan 2020b).

Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Report* pada tahun 2018, Pakistan berada pada peringkat 148 dari 149 negara dengan total indeks 0,550 (World Economic Forum 2018). Menilai indeks Pakistan yang berada pada peringkat 2

terbawah dan dengan angka 0,550 maka terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menganalisis dan memperbaiki keadaan gender di Pakistan. Terlebih lagi Pakistan menjadi negara dengan kesenjangan gender terburuk diantara 8 negara percontohan *Delivering as One*, yaitu Albania, Tanjung Verde, Mozambik, Rwanda, Tanzania, Uruguay, dan Vietnam (United Nations, n.d.). Bukti nyata dari data ini adalah organisasi HAM di Pakistan mencatat lebih dari 5.000 perempuan Pakistan telah terbunuh sejak tahun 2012 (Hussain 2023).

Delivering as One (DaO) merupakan konsep PBB yang menekankan pada empat prinsip, yaitu satu pemimpin, satu program, satu anggaran, dan satu kantor agar tercipta efektivitas pada sistem kerja PBB (United Nations, n.d.). Pada akhir tahun 2006 konsep ini diuji coba pada delapan negara dan diluncurkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 2007 (United Nations Sustainable Development Group 2009, 3). Pilar utama dalam mewujudkan *Delivering as One* adalah *"The One UN Program"* yang berfungsi untuk menyatukan sistem PBB di bawah satu strategi atau rencana kerja bersama pembangunan nasional (United Nations Sustainable Development Group 2014). Pada tahun 2018 hingga 2022, Pakistan melaksanakan program ketiga dari DaO ini dengan berjudul UNSDF. UNSDF merupakan program perencanaan strategis jangka menengah atau selama 5 tahun dengan tujuan mewujudkan visi prioritas pembangunan nasional Pakistan. Setelah Pakistan menetapkan komitmennya pada Agenda 2030 dengan menggunakan SDGs, maka UNSDF yang dilaksanakan pada 2018 hingga 2022 ini menjadi program DaO pertama yang berkomitmen pada SDGs demi mewujudkan Agenda 2030 dan Visi Pembangunan Pakistan 2025.

Visi Pakistan 2025 berfungsi sebagai panduan penting untuk pengembangan strategi dan peta jalan yang efektif guna mencapai tujuan dan aspirasi nasional Pakistan (Ministry of Planning, Development & Special Initiatives, n.d., 3). Pembentukan Visi Pakistan 2025 bertujuan untuk menjadikan negara Pakistan berada pada daftar negara berpendapatan kelas menengah pada 2025. Visi Pakistan 2025 berpaku pada 7 poin yang digunakan sebagai pilar, antara lain mengutamakan masyarakat, pertumbuhan, tata kelola, keamanan, kewirausahaan, ekonomi berbasis pengetahuan, konektivitas. Poin yang dimiliki oleh Visi Pakistan 2025 ini selaras dengan satu atau lebih proposal terbaru untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Pilar 1-4 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) (Ministry of Planning, Development & Special Initiatives, n.d., 10).

Salah satu hasil yang direncanakan dari UNSDF adalah mengenai Gender, Kesetaraan, dan Martabat. Hasil ini mencerminkan tiga dari tujuh poin visi Pakistan, yaitu mengutamakan masyarakat, pertumbuhan, dan kewirausahaan serta 17 poin SDGs yang saling berkaitan untuk kesejahteraan perempuan Pakistan (United Nations Pakistan 2020, 79).

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengimplementasikan SDGs dan mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018 hingga 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan di Pakistan pada tahun 2018-2022.
2. Untuk menjelaskan bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender bagi perempuan di Pakistan pada tahun 2018-2022.

1.4 Cakupan penelitian

Diskriminasi berbasis gender yang terjadi di Pakistan tidak hanya terdiri dari kekerasan yang melibatkan fisik namun juga sudah melibatkan budaya maupun adat istiadat (seperti perkawinan paksa) dan kekerasan secara struktural (Azizah and Rahmawati 2022, 1). Meskipun Pemerintah Pakistan telah melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan berbagai kekerasan dan diskriminasi masih banyak kendala yang terjadi dan membuktikan bahwa Pemerintah Pakistan belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga mengakibatkan turunnya bantuan dari berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Alasan penulis memilih tahun 2018 hingga 2022 untuk diteliti adalah dikarenakan pada tahun tersebut Pakistan menjalankan UNSDF yang merupakan rancangan kerja jangka menengah atau 5 tahun yang dimiliki PBB sebagai bagian dari DaO. UNSDF memfokuskan programnya pada Visi Pakistan 2025 dan SDGs sebagai agenda pembangunannya yang telah ditegaskan komitmennya oleh Pakistan pada tahun 2016. Salah satu hasil yang direncanakan dari UNSDF adalah Gender, Kesetaraan, dan Martabat. Hasil ini mencerminkan tiga dari tujuh poin visi Pakistan dan dan 17 poin SDGs yang saling berkaitan (United Nations Pakistan 2020, 79).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentunya berdasar pada hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana peran PBB melalui UNSDF pada isu kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018-2022. Pada bagian ini penulis akan meninjau beberapa penelitian yang mengkaji tentang isu diskriminasi di Pakistan dan peran PBB di negara Pakistan serta negara lain dalam mengatasi isu gender.

Abdul Hadi (2017) dalam jurnalnya yang *berjudul "Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan"* menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan merupakan gejala dari sistem sosial patriarki yang membentuk mekanisme sosial subordinasi perempuan oleh laki-laki. Nilai-nilai patriarki ini telah tertanam pada masyarakat Pakistan melalui praktik sosial-budaya dan norma masyarakat. Ketika nilai patriarki dianggap terancam oleh perilaku perempuan, maka perempuan akan dihukum dengan kekerasan, pelecehan seksual,

maupun pembunuhan atas nama kehormatan. Meningkatnya kekerasan pada perempuan di Pakistan juga disebabkan oleh hukum dan pemerintah yang lemah dalam melindungi hak-hak perempuan Pakistan (Hadi 2017).

Tulisan kedua merupakan jurnal berjudul *"Violence against Women in Pakistan: Contributing Factors and New Interventions"* yang ditulis oleh Rozina Karmaliani, Aneeta Pasha, Saima Hirani, Rozina Somani, Shela Hirani, Nargis Asad, Laila Cassum, dan Judith Mcfarlane (2012). Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap perempuan, seperti faktor sosial-budaya, politik, hukum, ekonomi, dan psikologis. Budaya patriarki yang telah tertanam dalam masyarakat membentuk perspektif bahwa derajat laki-laki selalu di atas perempuan dan mereka harus tunduk pada laki-laki. Pandangan ini juga membawa perempuan menginternalisasi perasaan bahwa kekerasan yang datang pada dirinya adalah dikarenakan mereka perempuan. Budaya konservatif dan kurangnya sistem pemerintah dalam mencegah maupun menangani kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu alasan mengapa perempuan tidak mendapatkan keadilan (Karmaliani et al. 2012).

Selanjutnya, Kinanti Diah Ayu Setyowati, Andini Aulia Fitriyanti, dan Prilla Marsingga (2024) dalam jurnalnya yang berjudul "Peran UN Women dalam Isu Ketidaksetaraan Gender di Pakistan" menuliskan bahwa UN Women yang merupakan badan PBB membantu dan berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam mengupayakan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di Pakistan. UN Women telah membentuk berbagai program Pembangunan yang mendorong pemberdayaan kepada perempuan Pakistan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, Kesehatan, politik, dan lain-

lain. Salah satu program yang dibentuk UN Women dalam bidang ekonomi adalah *Women's Economic Empowerment* yang berfokus untuk menyediakan sumber daya dan layanan bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam bisnis. Selain itu, UN Women juga bekerja sama dengan kementerian untuk membentuk Undang-Undang pekerja Rumahan Provinsi dan berkolaborasi dengan National Counter Terrorism Authority dengan memberikan pendidikan kepada pegawai pemerintah dengan tujuan agar perempuan dapat melawan ekstremisme dan juga mempromosikan perdamaian serta toleransi kepada perempuan dan pemuda (Setyowati, Fitriyanti, and Marsingga 2024).

Tulisan terakhir merupakan jurnal yang berjudul "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak pada Saat Perang" yang ditulis oleh Monica Putri A. Kawalo (2019). Pada jurnal tersebut dituliskan bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang ditujukan untuk merealiasasikan keamanan dan perdamaian internasional mengeluarkan Resolusi PBB 1325 yang berisikan mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan sebagai bentuk perlindungan. PBB juga melalui CEDAW, UN Women, dan UNICEF menjalankan berbagai peran dalam melindungi dan mengatasi isu yang dihadapi perempuan dan anak-anak pada saat perang dikarenakan mereka lah yang mendapatkan dampak peperangan paling banyak (Kawalo 2019).

Dari penelitian yang disertakan di atas, jurnal pertama dan kedua menjelaskan faktor yang melatar belakangi tindak diskriminasi perempuan di Pakistan. Pada jurnal ketiga dijelaskan peran UN Women dalam menangani isu ini di Pakistan namun tidak menyertakan tahun penelitian secara spesifik. Sedangkan pada jurnal keempat dijelaskan peran PBB dalam melindungi perempuan saat

kondisi perang. Pada keempat penelitian tersebut tidak ada yang menganalisis mengenai bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Negara Pakistan pada tahun 2018 hingga 2022. Maka hal inilah yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan maka penulis akan menggunakan konsep implementasi kebijakan dalam organisasi internasional yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek (2008). Setelah lahirnya globalisasi, organisasi internasional bukan hanya memiliki peran sebagai instrumen negara dalam menciptakan koalisi namun juga menjadi salah satu aktor penting dalam politik global. Organisasi Internasional dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam peristiwa internasional melalui implementasi kebijakannya (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 3). Implementasi ini merupakan bentuk nyata dari perjanjian yang telah disepakati menjadi kebijakan dan diterapkan dalam bentuk aturan/regulasi, pengesahan undang-undang, dan pembentukan lembaga domestik maupun internasional. Dalam konsep ini terdapat tiga pendekatan yang dapat mempengaruhi besar peran organisasi internasional dalam proses implementasi kebijakan, yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach*, dan *Normative Approach* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9).

Tabel 2. Pendekatan dalam Konsep Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek

Pendekatan	*Enforcement Approach*	*Management Approach*	*Normative Approach*
Metode	*Naming and shaming* (penamaan dan dipermalukan): dilakukan dengan melakukan penilaian berdasarkan laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.	*Monitoring* (pemantauan): berdasarkan laporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.	Menekankan pada otoritas dan legitimasi.
	Sanctions (sanksi): pemberian sanksi ekonomi atau militer, keputusan hukuman terkait keuangan, atau dipermalukan.	*Capacity building and problem solving* (peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah): dengan pemberian saran ahli, interpretasi aturan, bantuan teknis atau keuangan.	Melakukan kontrol informasi.

Sumber: Joachim, Reinaldi, dan Verbeek (2008)

1.6.1 Enforcement Approach

Enforcement Approach atau pendekatan melalui penegakan hukum mendeskripsikan bahwa implementasi dari sebuah kebijakan internasional dapat berjalan dengan baik apabila melalui cara yang memaksa atau koersif. Negara sebagai aktor tentunya akan memperkirakan biaya dan manfaat yang diterima negaranya dalam menyetujui atau menjalankan suatu perjanjian internasional. Mereka tentunya akan lebih memilih untuk berpegang pada komitmennya atau membangun lembaga serta regulasinya bila manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dua poin yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah *naming and shaming* dan sanksi (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9).

Apabila suatu negara yang sudah bersedia menyetujui sebuah kebijakan atau perjanjian internasional melanggar perjanjian tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Sanksi ini dapat berupa *naming and shaming* atau penyebutan pelanggaran yang telah dilakukan negara sebagai bentuk mempermalukan reputasi negara tersebut. *Naming and shaming* ini didasarkan pada pemantauan dan penilaian organisasi internasional terhadap laporan regular negara, komite ahli, inspeksi, dan laporan organisasi non-pemerintah. Selain itu juga dapat berupa sanksi ekonomi dan sanksi militer yang akan membawa pada kerugian materi bagi negara tersebut (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 10)

1.6.2 Management Approach

Management Approach atau pendekatan manajerial mendeskripsikan bahwa negara memutuskan untuk menyetujui suatu perjanjian internasional melalui suasana yang damai dan kooperatif. Melalui upaya ini negara memiliki tujuan untuk membangun atau bahkan memulihkan keseimbangan dunia global melalui perwujudan kebijakan tersebut. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pada pendekatan manajerial lebih ditekankan pada pemantauan (*monitoring*) dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) serta penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan tujuan memastikan kepatuhan dan implementasi negara terhadap kebijakan internasional. Apabila suatu negara mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian internasionalnya maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti kurangnya kapasitas sumber daya dari negara tersebut serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terjadi. Oleh karena itu, melalui pendekatan manajerial permasalahan tersebut dapat diselesaikan

dengan konsultasi dan usaha kooperatif dari Organisasi Internasional dan aktor lainnya (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11).

Pemantauan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti pemberian laporan secara regular negara kepada organisasi internasional, pembentukan komite untuk menilai dan memberi saran, pemantauan di lapangan, atau bisa juga dilakukan dengan mengandalkan prosedur pengaduan yang diajukan oleh warga negara maupun negara lain. Pendekatan manajerial ini bersifat terbuka, sehingga memungkinkan aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, birokrasi, dan lembaga lainnya dapat memiliki peran penting dalam pengimplementasian kebijakan oleh suatu negara dengan membantu mengembangkan kapasitas dan penyelesaian masalah melalui pemberian bantuan teknis dan bantuan finansial. Kontribusi aktor ini dapat berupa pengawasan negara, peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pemberian bantuan finansial atau keuangan, dan memberikan bantuan ahli (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11).

1.6.3 Normative Approach

Normative Approach atau pendekatan normatif menekankan bahwa organisasi internasional dapat mempengaruhi negara agar mematuhi perjanjian internasional dengan memberikan kepercayaan. Dengan berdasarkan kepercayaan ini, negara akan menganggap bahwa organisasi internasional merupakan aktor penting yang memiliki otoritasnya sendiri. Otoritas yang dimiliki organisasi internasional ini akan membantu negara dalam mengimplementasikan perjanjian internasional di negara tersebut dengan melakukan kontrol pada informasi (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11).

Diantara ketiga perspektif yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini akan menggunakan *Management Approach*. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perannya sebagai organisasi internasional, PBB cenderung menggunakan cara yang kooperatif dengan melakukan pemantauan serta memberikan bantuan teknis dan keuangan. Sifat dari bantuan ini bersifat terbuka melalui kerja sama yang berarti hal-hal tersebut sesuai dengan cara yang dilakukan organisasi internasional dengan pendekatan manajerial. Dengan menggunakan pendekatan manajerial maka akan dilihat bagaimana PBB melakukan pemantauan berdasarkan laporan yang diserahkan oleh negara, aktor NGO, dan inspeksi, dan komite ahli. Program yang dilakukan PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan juga merupakan pemberian bantuan finansial dan teknis melalui kerja sama sesuai dengan bentuk implementasi pendekatan manajerial yang menekankan pada penyelesaian masalah dan peningkatan kapasitas.

1.7 Argumen Sementara

PBB sebagai organisasi internasional dalam mengupayakan kesejahteraan dan keadilan perempuan serta anak perempuan di Pakistan melalui UNSDF menggunakan konsep implementasi kebijakan dalam organisasi internasional yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek (2008), lebih tepatnya dengan menggunakan *management approach* atau pendekatan manajerial. Sesuai dengan poin-poin yang ditekankan pada *management approach* PBB dalam mengimplementasikan SDGs melalui UNSDF melakukan pemantauan (*monitoring*) dan penyelesaian masalah (*problem solving*) serta peningkatan kapasitas (*capacity building*). PBB melakukan pemantauan dengan berdasarkan

pada laporan rutin yang diberikan oleh negara Pakistan, laporan berdasarkan badan PBB yang berada di Pakistan seperti UN Women, laporan komite ahli, dan laporan NGO pada rentang waktu 2018 hingga 2022. Berdasarkan pendekatan manajerial, PBB melalui UNSDF juga melakukan peran penyelesaian masalah (*problem solving*) serta peningkatan kapasitas (*capacity building*) dengan memberikan rekomendasi dan advokasi berdasarkan saran ahli, pengembangan dan pembentukan undang-undang sebagai bentuk interpretasi aturan, dan pemberian bantuan teknis seperti pelatihan dan seminar dengan bekerja sama dengan Pemerintah Pakistan, NGO yang berfokus pada kesejahteraan perempuan di Pakistan, maupun badan PBB lainnya seperti UN Women.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan analisis terhadap peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan isu kesetaraan gender di Pakistan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dianggap relevan dikarenakan penelitian kualitatif mengungkapkan suatu penemuan dengan pengumpulan data dan fakta secara deskriptif (Murdiyanto 2020, 19). Sejalan dengan tujuannya untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh sosial yang tidak dapat diukur ataupun digambarkan melalui metode kuantitatif. Penelitian kualitatif akan melihat bagaimana subjek mendapatkan makna dari lingkungan dan bagaimana kemudian makna tersebut mempengaruhi tindakan subjek tersebut serta memberikan dampak kepada lingkungan (Fadli 2021, 36).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari sebuah penelitian merupakan variabel yang memiliki pengaruh dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi subjek penelitian sebagai organisasi internasional yang berpengaruh. Sedangkan objek merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini, peran atau upaya PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018-2022 menjadi objek penelitian.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder dengan melakukan analisis pada buku, jurnal, artikel, berita, maupun dokumen resmi yang telah dipublikasi oleh PBB Pakistan maupun sumber yang berkaitan sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, langkah awal yang dilakukan penulis dalam memulai penelitian ini adalah tahapan perencanaan, dalam tahapan ini penulis membaca serta memahami bahan bacaan yang ada sebagai sumber referensi dan membentuk garis besar permasalahan. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data, dalam tahap ini penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, artikel, berita, dan laporan yang membahas mengenai kesenjangan gender di Pakistan dan juga mengumpulkan berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan PBB maupun Pemerintah Pakistan mengenai

isu ini. Setelah mendapatkan data yang sesuai, langkah terakhir yang penulis lakukan adalah menganalisis data penelitian dan membuat kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terdiri dari empat bab yang akan mempermudah penulisan penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab I ini penulis memberikan penggambaran dasar dari penelitian. Bab ini terdiri latar belakang subjek dan objek permasalahan yang dikaji, rumusan permasalahan, tujuan dari diadakannya penelitian, cakupan penelitian, kajian pustaka sebelumnya sebagai pembanding, kerangka teori yang digunakan, argumen sementara penulis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB II: PBB dan Kesenjangan Gender di Pakistan Tahun 2018-2022

Pada bab ini penulis akan menjelaskan isu kesenjangan gender yang terjadi di Pakistan beserta dengan sebab terjadinya dan penulis juga akan membahas mengenai gambaran umum PBB di Pakistan dalam mengatasi isu kesenjangan gender.

BAB III: Peran PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan melalui Pendekatan Manajerial oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dengan menjelaskan bagaimana peran PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan

kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018 hingga 2022 dengan menggunakan pendekatan manajerial.

BAB IV: Kesimpulan

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan terkait penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

PBB DAN KESENJANGAN GENDER PADA PEREMPUAN DI PAKISTAN TAHUN 2018-2022

2.1 Kesenjangan Gender di Pakistan

Permasalahan kesenjangan gender yang terjadi kepada perempuan di Pakistan jika dilihat dari peringkat dan indeks yang dimiliki *Global Gender Gap Report* kian tahunnya berada pada posisi stabil dan jika melihat pada kondisi di lapangan justru semakin memburuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syed, Afzal, dan Tabassum (2015) mengenai faktor sosiologis yang mempengaruhi kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan, dijelaskan bahwa terdapat budaya sosial anti perempuan dan pemikiran patriarki yang masih berlaku, adanya perilaku segregasi kepada perempuan agar tetap di rumah, kurangnya pendidikan kepada perempuan, kurangnya representasi perempuan di forum politik, dan lemahnya hukum terhadap perlindungan perempuan menjadi alasan yang saling terkait dan memperkuat persistensi kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan (Syed, Afzal, and Tabassum 2015, 40).

Pakistan masih berakar kuat dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki di hierarki teratas dibandingkan perempuan yang kemudian memungkinkan adanya budaya yang dipertahankan sebagai semacam kontrol oleh setiap laki-laki (Tabassum 2016, 36). Masyarakat patriarki menganggap bahwa setiap perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Pemikiran patriarki ini kemudian mengarah pada banyaknya kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan sulitnya bagi perempuan di Pakistan untuk menuntut bagiannya dari sumber daya yang tersedia

(Karmaliani et al. 2012, 821). Budaya patriarki yang telah mengakar kuat ini memunculkan rasa berhak laki-laki terhadap perempuan. Secara psikologis, terdapat anggapan yang diterima secara luas bahwa perempuan di rumah harus bersikap pasif, tunduk, dan patuh kepada laki-laki (Karmaliani et al. 2012, 821).

Sebagai negara yang berbentuk federal, Pakistan terdiri dari: empat provinsi; satu wilayah ibu kota federal; dan dua wilayah administratif berpemerintahan sendiri. Keempat provinsi tersebut adalah Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan. Wilayah Ibu Kota Islamadad meliputi ibu kota. Dua wilayah administratif berpemerintahan sendiri adalah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Dengan bentuk pemerintahan yang federal terdapat adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun wilayah lainnya untuk menangani isu kesenjangan gender ini. Terdapat koordinasi dan inisiatif di tingkat federal dimana implementasi kebijakan dan program guna mengupayakan kesetaraan gender secara signifikan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Bukti-bukti kuat menunjukkan bahwa setiap provinsi di Pakistan memiliki kebijakan kesetaraan gender dan kerangka implementasi mereka sendiri, yang dikembangkan dengan dukungan dari organisasi internasional. Pengembangan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang berbeda untuk provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa, serta kebijakan kesetaraan gender terpisah untuk Balochistan dan Sindh, menegaskan tingkat otonomi provinsi yang substansial dalam menangani isu-isu gender (UN Women Pakistan 2020a).

2.1.1 Gender Based Violence

Kekerasan berbasis gender yang terjadi kepada perempuan di Pakistan dapat berbentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, *honour killings*

(pembunuhan demi kehormatan), maupun perdagangan manusia (Parveen 2011, 1). Berdasarkan *Pakistan Demographic and Health Survey* pada tahun 2018 ditemukan bahwa sebanyak 28% perempuan yang berusia 15-49 tahun sudah mengalami kekerasan secara fisik dan 6% perempuan telah mengalami kekerasan secara seksual. Selain itu, sebanyak 34% perempuan yang sudah menikah juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (National Institute of Population Studies and ICF 2019, 304). Pada tahun 2019 Polisi Nasional Bureau melaporkan terdapat 4.637 kasus perempuan yang menerima kekerasan secara seksual, 1.578 perempuan yang terbunuh, 13.916 perempuan yang diculik, dan 2.018 perempuan yang mengalami kasus pemukulan (Shahid 2022). Kasus kekerasan pada perempuan ini tidak berhenti di tahun 2018 dan 2019 saja namun terus berlanjut.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Sustainable Social Development Organisation (SSDO) terkait pelacakan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, pada tahun 2020 terdapat terdapat 30.858 kasus kekerasan pada perempuan dan anak perempuan dengan Punjab sebagai wilayah yang paling berdampak (Sustainable Social Development Organisation 2020, 9). Kekerasan yang diterima perempuan dan anak mencapai rekor yang mengkhawatirkan pada tahun 2021 dengan total 52.370 kasus yang dilaporkan dan hanya 8.719 kasus yang terlaporkan di media (Sustainable Social Development Organisation 2021, 4). Pada tahun 2022, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kantor Inspektur Jenderal Kepolisian Punjab terdapat 34.854 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Punjab dengan penculikan sebagai kasus yang paling banyak terjadi. Pada tahun yang sama 1.024 perempuan terbunuh, 395 perempuan kehilangan

nyawa dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga, dan 176 perempuan dibunuh demi kehormatan (Kashif 2024).

2.1.2 Bidang Ekonomi

Kesenjangan gender yang terjadi kepada perempuan di Pakistan pada bidang ekonomi terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti yang terlihat pada persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Pakistan pada tahun 2018 hingga 2022 yang berada pada angka 21,7-24,6%, angka ini tentunya lebih rendah dari laki-laki yang bisa mencapai angka 81% (World Bank Open Data, n.d.-a). Persentase ini berdasarkan pada angka penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan aktif secara ekonomi, baik itu memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Bentuk lain kesenjangan gender pada bidang ekonomi yang terjadi di Pakistan dapat dilihat dari perbedaan persentase tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 3. Persentase Pengangguran di Pakistan Berdasarkan Gender

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2018	4,6%	4%
2019	6,3%	4,4%
2020	7,5%	5,8%
2021	9,2%	5,5%
2022	7,7%	4,9%

Sumber: World Bank Data (2018-2022)

Tabel ini menghitung angka pengangguran berdasarkan partisipasi angkatan kerja pada tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak perempuan yang tidak bekerja dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan paling rendah berada pada angka 4,6% pada tahun 2018 dan terus melonjak hingga mencapai 9,2% pada tahun 2021 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, yaitu pada angka 7,7% (World Bank Open Data, n.d.-e). Sementara persentase laki-laki paling rendah berada pada angka 4% pada tahun 2018 dan paling tinggi pada angka 5,8% pada tahun 2019. Data ini memperlihatkan bahwa persentase perempuan selalu jauh lebih besar dari laki-laki. Tingginya pengangguran yang dialami perempuan ini diakibatkan rendahnya partisipasi perempuan di sektor pekerjaan yang dapat dikaitkan dengan adanya pembatasan pada mobilitas mereka, kurangnya akses ke pekerjaan yang produktif dan berupah, pelecehan, dan juga diskriminasi secara sistemik (International Labour Organization 2010).

2.1.3 Bidang Kesehatan

Pakistan perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kesehatan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan di Pakistan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadikan negara Pakistan sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat kelahiran total tertinggi di dunia dengan 22 kelahiran per 1.000 orang (Khan 2023).

Tabel 4. Indeks Tingkat Kelahiran di Pakistan

Tahun	Jumlah Kelahiran per Perempuan
2018	3,7

2019	3,6
2020	3,5
2021	3,5
2022	3,4

Sumber: World Bank Data (2018-2022)

Berdasarkan data yang disajikan oleh World Bank pada tahun 2018 hingga 2022 setiap perempuan di Pakistan setidaknya akan melahirkan 3 anak. Dengan tingginya angka kelahiran ini tentunya membawa beberapa penyebab, salah satunya adalah tingginya kematian ibu di Pakistan. Pada tahun 2018 terdapat 178 ibu yang mengalami kematian dan pada tahun 2019 terdapat 179 ibu yang mengalami kematian. Namun, pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan menjadi 154 ibu yang mengalami kematian dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022, yaitu 186 ibu yang mengalami kematian (World Bank Open Data, n.d.-b). Data ini dihitung setiap 100.000 kelahiran bayi hidup. Tingginya tingkat kematian pada ibu ini dikarenakan keadaan gizi ibu di Pakistan yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya ibu yang mengalami anemia dan malnutrisi mengakibatkan pemberian ASI yang tidak optimal dan menyebabkan kanker payudara pada ibu serta *stunting* pada anak (Junaidi 2024).

2.1.4 Bidang Pendidikan

Jika dilihat pada bidang pendidikan, partisipasi anak perempuan dalam sekolah untuk mendapatkan pendidikan tergolong sangat rendah. Menurut *Pakistan Education Statistic* yang ditulis oleh Lembaga Pendidikan Pakistan, persentase

partisipasi sekolah dalam setiap tingkat bila dibedakan berdasarkan partisipasi setiap gender maka adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Persentase Partisipasi Sekolah dalam Setiap Tingkat Berdasarkan Gender

Tahun	Sekolah Dasar		Sekolah Menengah		Sekolah Menengah Atas	
	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
2018-19	45%	55%	44%	56%	55%	45%
2019-20	45%	55%	45%	55%	54%	46%
2020-21	45%	55%	44%	56%	43%	57%
2021-22	45%	55%	45%	55%	43%	57%

Sumber: Pakistan Institute of Education (2018-2022)

Berdasarkan tabel tersebut, perempuan yang menempuh pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pada tahun 2018 hingga 2022 selalu memiliki persentase yang lebih kecil dari laki-laki, yaitu pada 45% untuk jenjang sekolah dasar dan 44% atau 45% untuk jenjang sekolah menengah. Sementara untuk jenjang sekolah menengah atas, pada tahun 2018 dan 2019 perempuan memiliki persentase yang lebih besar daripada laki-laki, yaitu 55% (Pakistan Institute of Education 2022a; 2022b). Namun, pada tahun 2020 hingga 2022 persentase tersebut kembali mengecil menjadi 43% (Pakistan Institute of Education 2022c; 2024). Rendahnya persentase perempuan yang menempuh pendidikan di sekolah kemudian memberikan pengaruh pada kemampuan literasinya.

Tabel 6. Persentase Literasi di Pakistan Berdasarkan Gender

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2018	44,3%	69,1%
2019	46,5%	69,3%
2020	46,5%	71,1%
2021	46,5%	71,1%
2022	48%	70%

Sumber: World Economic Forum (2018-2022)

Tabel di atas menghitung persentase literasi perempuan dan laki-laki sesuai jumlah populasi berdasarkan gendernya. Pada tahun 2018 hingga 2022 persentase perempuan dalam literasi selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki (World Economic Forum 2018; 2019; 2021; 2021; 2022). Persentase ini juga menunjukkan rendahnya akses pendidikan yang diterima anak perempuan jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Rendahnya pendidikan pada perempuan di Pakistan juga diperburuk dengan banyaknya perempuan berusia 5-24 tahun yang putus sekolah dikarenakan pendidikan dirasa sudah tidak penting dan menikah muda (The World Bank 2024).

2.1.5 Bidang Politik

Partisipasi perempuan pada bidang politik di Pakistan juga masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Maka dari itu, untuk memaksimalkan partisipasi perempuan di Pakistan masih perlu perjuangan yang panjang.

Dikarenakan pada tahun 2018 hingga 2022, perempuan di Pakistan hanya mendapatkan 20% kuota di kursi parlemen (World Bank Open Data, n.d.-c). Kuota ini didasarkan pada Pasal 51 Ayat 3 Konstitusi Republik Islam Pakistan yang mengatur tentang struktur parlemen negara tersebut, Majlis-e-Shoora (Pakistan, n.d.). Sedangkan sisa 80% dari kursi parlemen ini ditujukan kepada laki-laki di Pakistan. Selain minimnya perempuan yang berada di kursi parlemen, kesenjangan juga dapat dilihat pada persentase perempuan pada posisi menteri

Tabel 7. Persentase Pemegang Posisi Menteri di Pakistan Berdasarkan Gender

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2018	12%	88%
2019	12%	88%
2020	10,7%	89,3%
2021	10,7%	89,3%
2022	9,4%	91,6%

Sumber: Inter-Parliamentary Union (2018-2022)

Berdasarkan data yang dikumpulkan Inter-Parliamentary Union mengenai persentase perempuan dalam posisi menteri, perempuan di Pakistan memiliki persentase yang jauh lebih kecil daripada laki-laki. Hanya 9-12% perempuan saja yang berhasil mendapatkan posisi menteri di Pakistan (World Bank Open Data, n.d.-d). Sementara laki-laki memiliki peluang dan kesempatan yang lebih banyak

yaitu sebesar 88-91%. Persentase perempuan di posisi menteri ini juga mengalami penurunan seiring berjalannya tahun dari 2018 hingga 2022, yang semula berada pada angka 12% menjadi 9,4%. Minimnya partisipasi perempuan pada bidang politik ini akan menghasilkan sulitnya pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan undang-undang dan peraturan berbasis gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat secara keseluruhan (Bari 2010).

2.2. *ONE UN Programme* di Pakistan

Sebagai negara yang tergabung dengan konsep *Delivering as One* yang dimiliki PBB, Pakistan telah menjalankan 2 program *One UN Programme* sebelum UNSDF. Program tersebut adalah *One UN Programme I* yang dijalankan pada tahun 2009 hingga 2013 dan *One UN Programme II* yang dijalankan pada tahun 2013 hingga 2017. Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PBB, DaO, dan *One UN Programme* serta membahas *One UN Programme* yang telah yang dijalankan Pakistan sebelum UNSDF, yaitu *One UN Programme I* dan *One UN Programme II*.

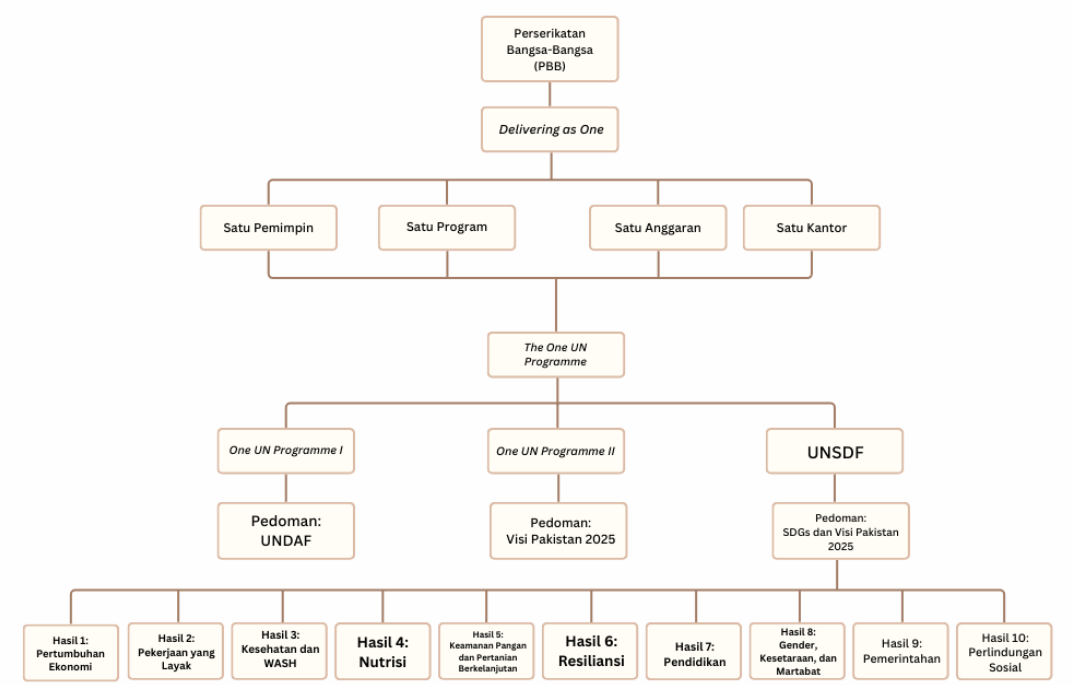
2.2.1 PBB, DaO, dan One UN Programme

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia pada tahun 2005 negara anggota PBB setuju bahwa perlu adanya reformasi dalam kegiatan operasional sistem PBB agar tercipta pembangunan yang lebih efektif, efisien, terkoordinasi (United Nations 2006, 1). Maka dari itu, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, Kofi Annan, membentuk Panel Tingkat Tinggi tentang Koherensi Seluruh Sistem PBB di Bidang Pembangunan, Bantuan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup. Melalui panel

tersebut tercipta rekomendasi utama, yaitu bahwa sistem PBB harus dibentuk secara *Delivering as One* di tingkat negara. Dengan kata lain PBB harus membentuk sistem yang berpaku pada satu pemimpin, satu program, satu anggaran, dan satu kantor (United Nations, n.d.). Konsep *Delivering as One* (DaO) diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 2007 dengan 8 negara yang secara sukarela menjadi negara percontohan dari konsep ini, antara lain Albania, Tanjung Verde, Mozambik, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Uruguay, dan Vietnam (United Nations Sustainable Development Group 2009, 3).

Tujuan utama dari peluncuran DaO adalah untuk meningkatkan dampak yang dimiliki sistem PBB di tingkat negara dengan memanfaatkan keahlian dari seluruh sistem PBB dan menciptakan sinergi antara badan-badan PBB. Dengan demikian, DaO akan meningkatkan dampak kegiatan operasional PBB dalam mendukung prioritas nasional dan tujuan pembangunan negara (United Nations Sustainable Development Group 2009, 3). Untuk mencapai tujuan ini maka dibentuklah program bersama di setiap negara yang diberi nama *"The One UN Programme"*. Melalui program bersama ini tim negara PBB dapat mengeksplorasi bagaimana konsep DaO dapat membantu mencapai prioritas nasional dengan menyatukan sistem PBB di bawah satu strategi pembangunan nasional yang didukung dengan kebijakan dan layanan yang terintegrasi serta pemantauan waktu secara nyata melalui rencana kerja bersama (United Nations Sustainable Development Group 2014). *One UN Programme* menjadi pilar utama dalam mewujudkan reformasi sistem PBB dengan menjadi kerangka kerja yang mencakup strategi, inisiatif, pendekatan, dan alat yang berasal dari sumber daya PBB.

Gambar 1. Bagan Konsep UNSDF



Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (2018)

Sebagai salah satu negara percontohan DaO, Pakistan mengaplikasikan *One UN Programme* (OP) di negaranya agar mencapai prioritas nasional. Di Pakistan, OP sudah berjalan sebanyak tiga kali, antara lain OP I pada tahun 2009 hingga 2013, OP II pada tahun 2013 hingga 2017, dan UNSDF pada tahun 2018 hingga 2022. Gambar di atas menunjukkan bagan konsep yang dimiliki oleh UNSDF sebagai program ketiga dari *The One UN Programme* yang dimiliki oleh *Delivering as One* PBB beserta dengan pedoman yang digunakan dan 10 hasil yang ingin dicapai dari UNSDF. Fokus dan tujuan dari pelaksanaan OP di setiap periode tentunya akan berbeda menyesuaikan prioritas negara pada periode tersebut. Pelaksanaan OP I di Pakistan yang awalnya direncanakan hanya berjalan untuk 2 tahun, yaitu pada tahun 2009 hingga 2010 kemudian disepakati untuk diperpanjang

hingga 2013 (United Nations Pakistan 2004, 4). OP I menyatukan 19 badan PBB yang berada di Pakistan dan berlandaskan pada Kerangka Kerja Pembangunan PBB (UNDAF) dengan bertujuan untuk berfokus pada isu Kesetaraan Gender, Keterlibatan Masyarakat Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Pengungsi (United Nations Pakistan 2014, 1).

Dengan penutupan resmi OP I pada tahun 2012, beberapa badan PBB tetap melanjutkan kegiatan OP I untuk memanfaatkan dana yang belum dimanfaatkan hingga Desember 2013 (United Nations Pakistan 2014, 1). Tahun 2013 menjadi tahun transisi dari OP I ke OP II yang akan dilaksanakan pada 2013 hingga 2017. OP II di Pakistan memiliki fokus pada enam area prioritas strategis, antara lain mengembangkan akses dan layanan yang adil dan berkualitas untuk populasi yang rentan, membentuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan nasional terhadap bencana dan krisis, menguatkan tata kelola pemerintah dan integritas sosial, menciptakan kesetaraan gender dan keadilan sosial, serta menciptakan ketahanan gizi dan pangan bagi kelompok yang rentan (United Nations Development Programme 2013). Enam area prioritas strategis ini sejalan dengan prioritas nasional Pakistan yang tercantum dalam Visi Pakistan 2025 (Multi-Partner Trust Fund Office 2019, 4).

Dengan pengadopsian SDGs menjadi tujuan pembangunan Pakistan pada tahun 2016, OP III atau yang bisa juga disebut dengan UNSDF menjadikan 17 poin SDGs dan Visi Pakistan 2025 sebagai landasan kerjanya. UNSDF mencakup sepuluh bidang hasil yang selaras dengan Visi Pakistan 2025 dan SDGs dengan penekanan khusus pada peningkatan kehidupan masyarakat yang paling rentan

(United Nations Pakistan 2020, 11). Sepuluh bidang hasil tersebut, antara lain pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, kesehatan dan WASH, nutrisi, ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, pertahanan, pendidikan, kesetaraan gender dan martabat, pemerintahan, dan perlindungan sosial (United Nations Pakistan 2020, 12). PBB yang berperan sebagai koordinator pemangku kepentingan, penasihat, promotor, dan advokat di Pakistan akan bekerja untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sosial yang inklusif dengan mengimplementasikan UNSDF pada tahun 2018 hingga 2022 (United Nations Pakistan 2020, 11).

2.2.2 One UN Programme I dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan

Pakistan menjalankan program *One UN Programme I* (OP I) pada tahun 2009 hingga 2013. OP I ditandatangani pada 4 Februari 2009 di hadapan Sekretaris Jenderal PBB dan Perdana Menteri Pakistan (United Nations Pakistan 2014, 8). Terdapat beberapa program dan upaya yang dilakukan PBB melalui OP I dalam mengatasi kesenjangan gender di Pakistan. Kemajuan yang cukup besar terlihat dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender dan memajukan kesetaraan gender. PBB berhasil membantu dalam pembentukan RUU KDRT Sindh yang kemudian berhasil disahkan pada Maret 2013. Pada RUU tersebut terdapat rancangan implementasi terkait Undang-Undang Anti Pelecehan Seksual di Balochistan dan Pakistan. Melalui OP I, PBB juga berhasil mendukung pengesahan RUU Perlindungan Terhadap Pelecehan Perempuan di Tempat Kerja, dan RUU Pelecehan Seksual serta RUU Kejahatan Air Keras terhadap perempuan. Selain itu dalam tahap provinsi, PBB meluncurkan Aliansi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di Balochistan, dan pembentukan

Komite Pengawas Implementasi (anti-pelecehan seksual) di tingkat provinsi (United Nations Pakistan 2014).

PBB berhasil meluncurkan kampanye *A Promise is a Promise: Time for Action to End Violence Against Women* dan kampanye advokasi *Tashadud Na Manzur* yang menyebarkan pesan terkait hak perempuan dan pencegahan serta penghapusan kekerasan kepada perempuan (United Nations Pakistan 2014). Kampanye ini menggunakan media sosial dan berakhir pada April 2013, melalui kampanye ini terdapat 1,2 juta orang yang teredukasi. Berbagai pelatihan teknis juga diberikan PBB kepada perempuan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama yang dijalin PBB dan Departemen Sektor Sosial menghasilkan pelatihan bagi 142 perempuan sebagai pelatih utama dari Kesehatan, Pendidikan & Kesejahteraan Sosial dalam pengurangan risiko bencana. Melalui OP I, PBB juga mendukung Program Pengendalian AIDS Provinsi untuk meningkatkan jangkauan masyarakat. Sebagai hasilnya, 4.037 perempuan berhasil diberikan konseling dan pengujian HIV. PBB pada tahun 2010 juga berhasil bekerja sama dalam pelatihan kejuruan bidang jahitan industri, yang kemudian menghasilkan 460 perempuan terlatih di bidang ini (United Nations Pakistan 2014).

2.2.3 One UN Programme II dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan

Setelah menjalankan *One UN Programme I* hingga tahun 2013 status dan kualitas hidup perempuan di Pakistan memang telah menunjukkan peningkatan, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender di semua sektor di negara ini. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 Pakistan masih menjadi negara yang berada di peringkat terendah, yaitu pada peringkat 135 dari 136 negara dalam bidang kesetaraan gender berdasarkan *Global Gender Gap*

Report yang ditulis oleh World Economic Forum (World Economic Forum 2013). Maka dari itu, PBB kembali menjalankan *One UN Programme II* (OP II) yang mulai dijalankan pada tahun 2013 hingga 2017 (United Nations Development Programme 2013). Dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan, PBB melalui OP II memberikan bantuan dalam menyusun rancangan kebijakan terkait pekerja rumahan di Provinsi Sindh dan Punjab agar mendapatkan upah yang adil, jaminan sosial, dan hak-hak dasar bagi para pekerja rumahan. Kebijakan terkait pekerja rumah tangga Sindh ini berhasil disahkan pada tahun 2018. Selain bantuan dalam membentuk kebijakan, PBB juga memberikan bantuan pada lebih dari 5 juta perempuan di Pakistan agar dapat mengakses layanan air sanitasi, dan kebersihan yang lebih baik di tahun 2018 (Multi-Partner Trust Fund Office 2019).

Selama periode OP II, berbagai kegiatan PBB memastikan bahwa kesetaraan gender tetap menjadi pusat perhatian dalam wacana nasional. Seperti adanya konsultasi tingkat tinggi mengenai ruang publik yang aman, 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender, kampanye mengenai hak-hak perempuan penyandang disabilitas, dan kampanye *HeForShe* pada tahun 2016. Berkat adanya kampanye *HeForShe* ini, 5.000 laki-laki dan perempuan mahasiswa di Universitas Teknik dan Teknologi Lahore tergerak untuk bergabung untuk memajukan kesetaraan gender (Multi-Partner Trust Fund Office 2019).

Dalam permasalahan kekerasan pada perempuan PBB mengeluarkan inisiatif untuk menyadarkan masyarakat agar menjangkau para korban, mempromosikan jalur pelaporan dan rujukan baru, dan mendukung pemberian layanan. Pada tahun 2013, 18 ruang ramah perempuan dan tiga pusat fasilitasi perempuan menyediakan layanan bagi 3.670 perempuan dan anak-anak di Khyber

Pakhtunkhwa (Multi-Partner Trust Fund Office 2019). Hasilnya, 175 kasus kekerasan terhadap perempuan telah didaftarkan, karena para perempuan merasa didukung untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Meski OP II telah berakhir pada 2018, inisiatif PBB dalam memberikan bantuan kepada perempuan agar tercipta kesetaraan gender di Pakistan terus berlanjut. PBB kembali menjalankan UNSDF pada tahun 2018 hingga 2022 sebagai bentuk dukungan dan upaya PBB dalam mencapai Visi Pakistan 2025 dan SDGs.

BAB 3

PERAN PBB MELALUI UNSDF DALAM MENGUPAYAKAN KESETARAAN GENDER DI PAKISTAN MELALUI PENDEKATAN MANAJERIAL OLEH JUTTA JOACHIM, BOB REINALDI, DAN BERTJAN VERBEEK

3.1 Peran *Monitoring* PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan Tahun 2018-2022

Pendekatan manajerial mendeskripsikan bahwa negara memutuskan untuk menyetujui suatu perjanjian internasional melalui suasana yang damai dan kooperatif. Melalui upaya ini negara memiliki tujuan untuk membangun atau bahkan memulihkan keseimbangan dunia global melalui perwujudan kebijakan tersebut. Berbeda dengan pendekatan lainnya, pada pendekatan manajerial lebih ditekankan salah satunya pada pemantauan (*monitoring*) (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9). Pemantauan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, pada hal ini PBB melalui UNSDF dalam memantau implementasi Pakistan terhadap SDGs pada tahun 2018 hingga 2022 berdasarkan pada pemberian laporan Negara Pakistan secara rutin, pemantauan langsung di lapangan, dan berdasarkan pada laporan NGO Pakistan. Dalam hal ini, PBB tidak melakukan pemantauan berdasarkan laporan yang diserahkan oleh komite ahli.

3.1.1 Monitoring Berdasarkan Laporan Negara

PBB untuk memastikan pengimplementasian SDGs di Pakistan melakukan pemantauan berdasarkan pada laporan negara yang diserahkan Negara Pakistan. PBB melakukan pemantauan berdasarkan laporan rutin yang diserahkan oleh

National Commission on the Status of Women (NCSW) atau Komisi Nasional tentang Status Perempuan. Sebagai badan pemerintah yang terbentuk dari hasil dan komitmen Pakistan pada *Beijing Declaration and Platform for Action* 1995 dan *National Plan of Action* (NPA) for Women 1998, NCSW menyediakan laporan yang berisikan kebijakan, program, dan langkah-langkah lain yang diambil oleh NCSW untuk meningkatkan hak sosial, ekonomi, politik dan hukum perempuan Pakistan (National Commission on the Status of Women, n.d.-a; 2019). Laporan rutin yang diserahkan oleh NCSW ini pertama kali dipublikasi pada tahun 2006 dan terus berlanjut hingga tahun 2022, terkecuali pada tahun 2020 dikarenakan NCSW tidak mempublikasikan laporannya dikarenakan kosongnya posisi ketua NCSW (National Commission on the Status of Women, n.d.; 2022).

Laporan yang dituliskan oleh NCSW berisikan analisis terhadap situasi yang terjadi kepada perempuan Pakistan dan inisiatif yang telah diambil NCSW pada periode tersebut. Inisiatif yang diambil dapat berbentuk pengadaan seminar dan konsultasi pada tiga bidang utama, yaitu kekerasan pada perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan suara perempuan pada politik. Selain itu, laporan ini juga berisikan pendanaan yang dikeluarkan selama periode tersebut dan tantangan yang dihadapi (National Commission on the Status of Women 2019).

Laporan rutin yang dituliskan oleh NCSW pada tahun 2018-2019 menjelaskan NCSW telah mengeluarkan 76 respons, input, dan komentar mengenai hukum dan kebijakan yang ada. NCSW juga melakukan tugasnya dengan melakukan pemantauan implementasi hukum, hal yang dilakukan NCSW adalah melakukan pelacakan pada kasus-kasus yang terjadi pada perempuan di Pakistan agar dapat mengidentifikasi dan membuat rekomendasi yang sesuai guna mengatasi

kasus tersebut. Keluhan yang dimiliki perempuan di Pakistan juga ditampung oleh NCSW agar dapat mengetahui isu apa yang paling umum terjadi, mengidentifikasi kesenjangan dalam hukum dan sistem hukum yang ada, serta prosedur penanganan apa yang efektif bagi korban (National Commission on the Status of Women 2019). NCSW membentuk kesadaran masyarakat melalui pembentukan kelompok inti dari organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk melawan kekerasan seksual pada anak, berkolaborasi dengan Shirkat Gah Women's Resource Centre dan membentuk dialog nasional guna mengakhiri pernikahan dini, dan mengadakan seminar *"Living with Dignity: Post Shelter Integration of Women Survivors of Violence"*. NCSW juga mengeluarkan penelitian dan publikasi mengenai perempuan pedesaan di Pakistan, pemilihan umum, dan lain-lain. Di laporan rutin ini NCSW juga menuliskan kesulitan yang dihadapi pada tahun 2018-2019 adalah kurangnya staf, kurangnya kapasitas staf, dan tidak adanya prosedur operasi standar (National Commission on the Status of Women 2019).

Berdasarkan pada laporan rutin yang dituliskan pada periode 2021-2022, NCSW telah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang untuk pembentukan Komisi Status Perempuan di Gilgit Baltistan. NCSW juga pada periode tersebut melakukan pemantauan dengan turun langsung mengunjungi Pusat Krisis Benazir Bhutto untuk Perempuan di Quetta, mengunjungi Penjara Perempuan di Quetta, dan mengunjungi Kantor Polisi Perempuan di Lahore (National Commission on the Status of Women 2022). NCSW pada periode 2021-2022 melakukan advokasi dan membentuk kepedulian masyarakat dengan membentuk Program *National Fellowship Media* untuk mempromosikan pelaporan gender di media, menyelenggarakan konsultasi tentang "Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di

Sektor Peradilan" yang menggarisbawahi mengenai perlunya meningkatkan keterwakilan perempuan secara langsung terkait dengan peningkatan akses perempuan terhadap keadilan dan pencapaian SDGs poin 5 (National Commission on the Status of Women 2022). NCSW juga meluncurkan inisiatif seperti *YES Centre* untuk memberikan layanan konsultasi kepada perempuan dan remaja putri dalam hal kewirausahaan dan pengembangan keterampilan, memperkuat kemitraan dengan organisasi lokal dan internasional, termasuk badan-badan PBB, untuk menangani masalah-masalah perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender, serta mengembangkan Portal Data Gender Nasional yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan bukti terkait gender guna menginformasikan kebijakan dan tindakan (National Commission on the Status of Women 2022). Secara keseluruhan laporan rutin yang dipublikasikan oleh NCSW ini dibuat dengan tujuan agar tercipta refleksi yang dapat mendorong inisiatif lain guna membangun masa depan yang lebih aman, adil, dan inklusif bagi perempuan Pakistan (National Commission on the Status of Women 2023, 3). Sehingga berdasarkan laporan rutin ini, PBB dapat membentuk kebijakan maupun program melalui UNSDF yang sesuai dengan kondisi perempuan di Pakistan.

3.1.2 Monitoring Berdasarkan Inspeksi

Menurut pendekatan manajerial, pemantauan dapat dilakukan juga dengan melakukan inspeksi. Inspeksi dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dengan mengirimkan perwakilan dari PBB ke Negara Pakistan untuk memastikan program dan kebijakan yang dibentuk PBB melalui UNSDF dalam mengimplementasikan SDGs di Pakistan berjalan dengan baik. Inspeksi yang dilakukan PBB didukung dengan didirikannya *Country Office* atau kantor

perwakilan PBB di Pakistan. Dengan pembangunan kantor perwakilan PBB ini maka akan memudahkan untuk perwakilan PBB melakukan kunjungan lapangan dan memantau jalannya program serta kebijakan PBB melalui UNSDF di Pakistan. Inspeksi yang dilakukan PBB di Pakistan ini kemudian dituangkan menjadi *Annual Report* atau laporan rutin yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2018 dan terus berlanjut hingga tahun 2022. Pada laporan tersebut dituliskan program dan kebijakan yang dilaksanakan PBB dan badan-badan PBB melalui UNSDF di Pakistan, pihak yang bekerja sama, dana yang dikeluarkan pada 10 *outcome* yang ingin dicapai, evaluasi, dan rekomendasi fokus untuk tahun selanjutnya (United Nations Pakistan 2019).

Beberapa upaya yang dilakukan PBB tercantum seperti pada laporan rutin tahun 2018, PBB menuliskan upayanya dalam mengimplementasikan SDGs dengan merancang Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Punjab dan membentuk kampanye *16 Days of Activism against Gender-based Violence*. Pada tahun 2019, PBB menyerahkan 14 bis khusus wanita, 31 halte bis dan meluncurkan aplikasi *Safe Women.* Melanjutkan pada tahun selanjutnya, pada tahun 2020 PBB mengadakan pelatihan pada 2.000 penyedia layanan kesehatan guna meningkatkan pelayanan *telemedicine* SRH dan juga membentuk 6 pusat *telemedicine*. Pada tahun 2021 PBB meluncurkan kampanye media mengenai Pekan Menyusui Sedunia dan berhasil mendorong 18 lembaga publik mendirikan ruang menyusui yang berkualitas. PBB juga melakukan upaya pada tahun 2022 dengan memberikan pelatihan pada 987 penyedia layanan kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas, mendukung 26 Ruang Kesehatan Ramah Wanita, dan mengadakan kamp penjangkauan untuk 9.000 wanita dan anak perempuan di Gilgit-Baltistan dan

Khyber Pakhtunkhwa (United Nations Pakistan 2019; 2020a; 2021; 2022; 2024). Lebih lengkapnya upaya PBB melalui UNSDF ini akan dibahas pada subbab selanjutnya.

3.1.3 Monitoring Berdasarkan Laporan NGO

Salah satu metode dari pemantauan adalah berdasarkan dengan laporan yang dimiliki oleh *Non-Governmental Organization* (NGO). NGO didefinisikan oleh Karns dan Mingst (2004) sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan berbasis sukarela dan memiliki tujuan bersama yang berorientasi pada kepentingan publik (Karns and Mingst 2004, 10). Organisasi Internasional menggunakan laporan yang berasal dari NGO yang bekerja di lapangan agar dapat memberikan perspektif langsung mengenai situasi perempuan di Pakistan. Laporan yang berasal dari NGO juga sering diajukan sebagai laporan bayangan atau laporan alternatif dalam mekanisme pemantauan hak asasi manusia oleh PBB (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9).

Pada hal ini PBB melalui UN Women, sebagai badan PBB yang berfokus pada kesejahteraan perempuan, melakukan pemantauan berdasarkan pada Aurat Foundation. Aurat Foundation berdiri pada tahun 1986 sebagai organisasi nonpemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan kesadaran pada masyarakat Pakistan mengenai kesetaraan gender (Aurat Foundation, n.d.). Aurat Foundation memiliki lima kantor regional dan 37 kantor lapangan yang berfungsi untuk melakukan pemantauan dan menjalankan program demi kesetaraan gender di Pakistan. Pemantauan yang dilakukan Aurat Foundation kemudian dituangkan menjadi laporan rutin yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2006. Laporan rutin yang dimiliki Aurat Foundation ini terus berjalan hingga tahun 2022.

Pada tahun 2018 hingga 2022 laporan rutin yang dimiliki Aurat Foundation terbagi menjadi beberapa bab, yaitu reformasi hukum dan kebijakan; peningkatan kapasitas dan proses konsultasi; mobilisasi sosial dan keterlibatan warga; advokasi, peningkatan kesadaran, dan lobi; dukungan untuk organisasi masyarakat sipil; serta penelitian dan publikasi. Pada laporan rutin 2022 juga disertakan strategi kemitraan dengan departemen, komisi, dan lembaga pemerintah (Aurat Foundation 2022). Berdasarkan laporan rutin yang dikeluarkan Aurat Foundation pada tahun 2018 hingga 2022 beberapa hal yang telah dilakukan Aurat Foundation, antara lain pada tahun 2018 menyelenggarakan "Pelatihan Satu Hari untuk Penggerak Sosial" tentang menggunakan hak pilih untuk partisipasi politik perempuan di Pakistan dan mengimplementasikan INSPIRED+ dengan berjudul "Promosi dan Perlindungan Hak-hak Sosial-Ekonomi Perempuan yang Bekerja di Punjab" dengan melakukan dialog dengan pemangku kepentingan guna mempromosikan dan melindungi hak ketenagakerjaan perempuan yang bekerja di sektor pertanian Punjab (Aurat Foundation 2018). Aurat Foundation juga menuliskan beberapa kebijakan yang telah diresmikan pada tahun 2018, yaitu Undang-Undang Perkawinan Punjab Sikh Anand Karaj 2018 dan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Sindh 2018 (Aurat Foundation 2018).

Pada laporan rutin tahun 2019 salah satu undang-undang yang diresmikan adalah Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Punjab 2019. Aurat Foundation juga melaksanakan beberapa program pada tahun 2019, yaitu Lokakarya Pengembangan Kapasitas satu hari tentang "Kerangka Hukum untuk Perlindungan Hak-Hak Perempuan" dan berkolaborasi dengan Institut Ilmu Administrasi Universitas Punjab untuk menyelenggarakan sebuah seminar tentang *Jahez Khori*

Band Karo dengan tujuan menciptakan kesadaran di kalangan pemuda tentang kampanye anti mahar (Aurat Foundation 2019). Pada laporan rutin tahun 2020, Aurat Foundation menuliskan bahwa undang-undang yang telah berhasil diresmikan pada tahun 2020 adalah Undang-Undang Peringatan, Respons, dan Pemulihan Zainab 2020; Undang-Undang Penegakan Hak Milik Perempuan 2020; dan Undang-Undang Otoritas Bantuan Hukum dan Keadilan 2020. Selain itu, Aurat Foundation mengimplementasikan proyek *National Socio-Economic Registry* (NSER) di 34 distrik di Pakistan guna menciptakan kesadaran publik tentang Program Dukungan Pendapatan Benazir dan pengumpulan data untuk memastikan partisipasi maksimum dari Rumah Tangga di seluruh Pakistan (Aurat Foundation 2020).

Laporan rutin yang dituliskan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa Aurat Foundation melakukan beberapa program, antara lain kursus pelatihan khusus bagi legislator dan pekerja partai, melaksanakan sesi seminar daring mengenai “Peran anggota parlemen untuk pembangunan inklusif di Pakistan”, dan Peluncuran studi penelitian mengenai “Kekerasan terhadap Perempuan & Anak Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 2020” (Aurat Foundation 2021). Pada laporan rutin 2022, Aurat Foundation menuliskan bahwa Aurat Foundation telah menandatangani nota kesepakatan dengan Komisi Hak Asasi Manusia Sindh dan Komisi Sindh untuk Status Perempuan dan melakukan beberapa program, seperti menyelenggarakan sesi orientasi tentang "Perempuan dalam Kepemimpinan di Pemerintahan dengan Staf Pusat Sumber Daya Kesehatan Seksual Angkatan 2, bekerja sama dengan UNDP menyelenggarakan pelatihan 3 hari untuk petugas Pemerintah Pakistan serta penyedia rujukan dan bantuan hukum tentang memastikan akses perempuan

terhadap keadilan di lima distrik Pakistan, dan mengorganisir 34 pertemuan komunitas di 5 distrik yang menjadi target dalam proyek promosi keadilan gender (Aurat Foundation 2022).

Secara keseluruhan Aurat Foundation menuliskan kondisi perempuan di Pakistan dan upaya serta program yang telah dilakukan Aurat Foundation (Aurat Foundation 2009). Berdasarkan laporan ini Aurat Foundation berharap akan menciptakan dan mengembangkan sinergi dalam upaya kesetaraan gender di Pakistan sehingga menghasilkan hasil yang dituju secara maksimal (Aurat Foundation 2009, 5).

3.2 Peran *Capacity Building and Problem Solving* PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan Tahun 2018-2022

Pada pendekatan manajerial yang dituliskan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek (2008) lebih ditekankan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) serta penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan tujuan memastikan kepatuhan dan implementasi negara terhadap kebijakan internasional. Metode ini dianggap lebih maksimal karena dengan adanya peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah suatu negara dapat berkembang serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memajukan negara tersebut (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). Berdasarkan teori ini, maka PBB dalam mengimplementasikan SDGs melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2018-2022 melakukan peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah dengan memberikan saran berdasarkan ahli, bantuan dalam interpretasi aturan atau kebijakan, dan bantuan teknis dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan.

3.2.1 Capacity Building and Problem Solving Melalui Saran Ahli dari PBB

Dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan, PBB melalui UNSDF membutuhkan saran ahli sebagai salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan organisasi internasional. Menurut Joachim, Reinaldi, dan Verbeek sebuah organisasi internasional dapat juga berfungsi sebagai penyedia pengetahuan dan advokasi bagi suatu negara (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). *Capacity building and problem solving* berdasarkan saran dari ahli yang dimiliki oleh PBB ini dapat berupa penyusunan laporan dan rekomendasi yang berbasis penelitian, konsultasi dengan Pemerintah Pakistan, dan evaluasi kebijakan.

Melalui program gabungan global PBB yang berisi UN Women, WHO, UNFPA, dan UNODC pada tahun 2019 dibentuk pedoman *Essential Services Package* (ESP) guna memfasilitasi perempuan yang menjadi korban kekerasan dengan meningkatkan koordinasi antara penyedia layanan penting seperti, sektor kesehatan, polisi, dan sistem peradilan. Pedoman ini juga kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Urdu agar dapat disebarluaskan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan di seluruh Pakistan (United Nations Pakistan 2020, 75). Pada tahun 2020 PBB melakukan advokasi dengan anggota parlemen perempuan, anggota partai politik, dan Aliansi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan terkait penghentian pernikahan anak dengan berlandaskan sebuah studi tentang Pernikahan Anak di Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab. Pada tahun yang sama PBB juga melakukan penelitian dan penulisan laporan analisis kesenjangan legislasi terkait pengakhiran kekerasan terhadap perempuan. Selain itu untuk mengatasi tantangan terhadap keselamatan dan mobilitas perempuan, Audit Keselamatan Perempuan di Tempat Umum

menawarkan rekomendasi berbasis bukti agar keselamatan perempuan di tempat umum dapat terjamin keselamatannya (United Nations Pakistan 2021).

Pada tahun 2021 PBB bersama dengan Pemerintah Pakistan mengumpulkan, menganalisis data, dan memperkuat mekanisme kelembagaan melalui perumusan rencana strategis di Komisi Nasional tentang Status Perempuan serta Kaukus Parlemen Perempuan Federal dan Provinsi. Penelitian ini akan memperluas dasar pengetahuan untuk memajukan kesetaraan gender di Pakistan, seperti pada Laporan Paritas Gender Punjab 2019-2020 hingga Analisis Ekonomi Politik tentang Pernikahan Anak, Analisis Kesenjangan tentang Implementasi Undang-Undang Pembatasan Pernikahan Anak Sindh, dan lain-lain (United Nations Pakistan 2022). Dan pada tahun terakhir UNSDF, PBB menyediakan data yang dipilah berdasarkan gender untuk memberikan informasi perencanaan dan pemberian layanan termasuk Portal Data Gender Nasional, panel kendali Unit Perlindungan Gender, dan basis data di Departemen Reklamasi dan Masa Percobaan Khyber Pakhtunkhwa serta Ombudsman Punjab tentang Perlindungan terhadap Pelecehan di Tempat Kerja (United Nations Pakistan 2024).

3.2.2 Capacity Building and Problem Solving Melalui Interpretasi Aturan

Peran *Capacity Building and Problem Solving* PBB melalui UNSDF di Pakistan dapat dilakukan juga dengan interpretasi aturan. Interpretasi aturan ini akan menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas negara Pakistan dalam membentuk, memahami, menyesuaikan, dan menerapkan aturan perundang-undangan. Pada tahun pertama UNSDF berjalan di Pakistan, PBB mengemukakan reformasi pada Pengesahan Undang-Undang Pekerja Rumahan Sindh tahun 2018

yang memperkuat hak, upah, dan jaminan sosial pekerja perempuan di Pakistan (United Nations Pakistan 2019, 68).

Pada tahun berikutnya, tahun 2019, PBB memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pembangunan perempuan di keempat provinsi, memungkinkan mereka untuk menyusun Kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (GEWE) di tingkat provinsi (United Nations Pakistan 2020, 72). Selain itu dengan adanya bantuan dari UN Women dalam penyusunan Kebijakan GEWE, Sindh menjadi provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan kebijakan tersebut. Pada tahun yang sama, Kaukus Parlemen Perempuan Federal Pakistan (WPC), WPC Khyber Pakhtunkhwa, dan Komite Pengarusutamaan Gender Punjab mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang Larangan Perkawinan Anak, termasuk menaikkan usia pernikahan untuk anak perempuan menjadi 18 tahun. UN Women juga terus membantu dalam mengupayakan hak-hak perempuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang bebas dari diskriminasi melalui kerja sama erat yang terjalin dengan badan-badan PBB terkait, Kementerian Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil, dan lembaga pelatihan teknis dan kejuruan (United Nations Pakistan 2020a).

Pada tahun 2020 PBB membantu keempat pemerintah provinsi di Pakistan untuk menyelesaikan dan mengesahkan Kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan beserta kerangka kerja pelaksanaannya (United Nations Pakistan 2021, 16). Dengan dukungan yang diberikan PBB, mitra-mitra Pemerintah Pakistan dapat memantau dan melaporkan komitmen internasional Pakistan agar kemudian PBB dapat membantu menyusun rancangan amandemen terhadap beberapa legislasi agar lebih berpihak kepada perempuan melalui proses konsultatif

yang dipimpin oleh ahli hukum (United Nations Pakistan 2021, 16). Pada tahun selanjutnya, tahun 2021, PBB melakukan pengembangan, pengesahan, serta implementasi undang-undang di Pakistan. Beberapa undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Rumahan Khyber Pakhtunkhwa 2021 dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberdayakan pekerja yang terpinggirkan, mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (United Nations Pakistan 2022, 17). Dengan adanya advokasi, bantuan, dan pengembangan kapasitas yang dilakukan PBB mendorong adanya reformasi legislatif untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan berbasis gender yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Anti-Pemerkosaan (Investigasi dan Pengadilan) 2021 hingga pemberlakuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khyber Pakhtunkhwa. Program Aturan Hukum yang dibentuk PBB di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa juga membangun kapasitas di seluruh sektor peradilan dan keamanan untuk memperluas penyediaan layanan multisektoral yang responsif gender bagi korban GBV (United Nations Pakistan 2022, 17).

Pada tahun terakhir UNSDF di Pakistan, yaitu pada tahun 2022 PBB membantu pemerintah provinsi untuk meninjau dan meningkatkan penerapan undang-undang tentang pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan di tempat kerja, hak milik perempuan, dan masa percobaan. Perancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa serta Undang-Undang Pekerja Rumah

Tangga di Wilayah Ibu Kota Islamabad membantu dalam memfasilitasi penegakan hukum kepada perempuan di daerah tersebut (United Nations Pakistan 2024, 17).

3.2.3 Capacity Building and Problem Solving Melalui Bantuan Teknis

Pemberian bantuan teknis kepada suatu negara akan menjadi bantuan yang lebih efektif dalam menghidupkan peran *Capacity Building and Problem Solving* yang dilakukan PBB melalui UNSDF pada tahun 2018 hingga 2022. Dimulai pada tahun 2018, demi mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender di Pakistan, PBB mengembangkan Prosedur Operasi Standar dan merancang Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Punjab. PBB juga membentuk sebuah kampanye yang berfokus pada mengakhiri pernikahan anak dengan nama *16 Days of Activism against Gender-based Violence* (United Nations Pakistan 2019, 68). Selain itu, peluncuran kerja sama antara PBB dengan Handicap International pada tahun 2018 memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan penyandang disabilitas dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi, mengupayakan layanan yang lebih baik, dan memungkinkan mereka untuk belajar, bekerja, dan berkembang (United Nations Pakistan 2019, 68).

Pada tahun 2018 dan 2019, UNOPS dan UN Women bermitra dengan Pemerintah Khyber Pakhtunkhwa berdasarkan pada pendanaan dari Pemerintah Jepang menyerahkan 16 bis khusus wanita di 2018 dan 14 bis khusus wanita di 2019 telah diserahkan kepada Departemen Transportasi Khyber Pakhtunkhwa yang dioperasikan oleh kondektur perempuan (United Nations Pakistan 2019; 2020a). Pada tahun 2018 saja, layanan bis ini telah memberikan manfaat bagi 1,36 juta orang. Selain bis khusus, 31 halte bis yang ditenagai panel surya juga disediakan untuk memastikan penerangan yang tidak terganggu setiap saat agar perempuan

Pakistan terhindar dari pelecehan seksual. UN Women juga meluncurkan aplikasi *Safe Women* agar memungkinkan para perempuan untuk berbagi lokasi mereka dengan teman dan keluarga saat bepergian dengan bis (United Nations Pakistan 2020a, 76).

Pada tahun 2019 UN Women, UNDP, FAO, dan UNICEF bermitra dengan Pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa membantu 1.100 perempuan untuk mendapatkan Kartu Identitas Nasional Terkomputerisasi (CNC) yang berfungsi untuk memastikan Perempuan tetap memiliki akses terhadap bantuan dan layanan penting. Di provinsi lain, di Sindh, UN Women berkolaborasi dengan Otoritas Pendidikan Teknis & Pelatihan Kejuruan (TEVTA) untuk memperkuat keterampilan kejuruan 97 perempuan penyandang disabilitas dengan program bertajuk *Moving from a Charity Model to Rights-based Work: Delivering as ONE for the Empowerment of Women with Disabilities* (United Nations Pakistan 2020a, 72). Sebuah program unggulan lain dari UN Women dilaksanakan dengan dukungan Norwegia berhasil mengubah kehidupan sejumlah pekerja rumahan wanita di Pakistan dengan meningkatkan kapasitas, menghubungkan dengan pasar konvensional dan digital, serta mengadvokasi legislasi dan perlindungan sosial kepada para pekerja rumahan wanita. Contoh dari distrik Thatta, Sindh, pada tiga bulan pertama 2019 program ini berhasil menjangkau 325 perempuan pekerja rumahan agar menerima pelatihan literasi keuangan dan 867 perempuan serta anak perempuan disadarkan akan undang-undang pro-perempuan dan mekanisme perlindungan (United Nations Pakistan 2020a, 73).

Pada tahun 2019 Program Gabungan Global Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNJP) menyatukan UN Women, WHO, UNFPA, dan UNODC untuk

meluncurkan *Essential Services Package* (ESP) agar tercipta layanan multisektoral yang berkualitas dan terkoordinasi untuk perempuan dan anak perempuan yang telah mengalami kekerasan berbasis gender (United Nations Pakistan 2020a, 75). Untuk menyediakan layanan yang mendukung untuk pelaporan dan investigasi kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, PBB merancang Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Gujrat, Punjab (United Nations Pakistan 2020a, 75).

Pada tahun 2020 kampanye PBB mengenai kesadaran tentang dukungan psikososial dan kekerasan berbasis gender berhasil menjangkau 10,15 juta orang. Pada bidang pendidikan, PBB memberikan akses pendidikan melalui Program Pembelajaran Akselerasi (ALP) baik dalam bentuk sekolah non-formal dan formal kepada 54% anak perempuan dari 215.161 anak yang tidak bersekolah (United Nations Pakistan 2021, 15). Dengan berdasarkan pada ESP sebagai kerangka kerja panduan, UNJP terus menanggapi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Maka dari itu, materi pelatihan berhasil dikembangkan dan lebih dari 600 pejabat penegak hukum dan peradilan dilatih dalam menangani GBV serta menegakkan hukum yang berpihak kepada perempuan. UNJP juga melakukan penguatan kapasitas kepada lembaga peradilan pidana, staf hukum, penegak hukum, pembuat keputusan, pemimpin opini, dan sektor penyediaan layanan untuk dapat merencanakan, membuat undang-undang, mengimplementasikan, dan menanggapi kebutuhan perempuan serta anak perempuan di Pakistan (United Nations Pakistan 2021, 16).

Melanjutkan program UNSDF di tahun 2021, PBB membentuk Program Aturan Hukum PBB di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa dengan membangun kapasitas seluruh sektor keadilan dan keamanan untuk memperluas penyediaan

layanan multisektoral yang responsif gender bagi para korban GBV. Sebagai hasilnya, 300 perempuan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial begitu juga dengan 11.551 perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi kemanusiaan (United Nations Pakistan 2022, 17).

PBB dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan pada tahun 2022 dalam bidang pendidikan, Program Pembelajaran Dipercepat yang dimiliki UNICEF membantu 1.185 anak perempuan yang sudah berusia lanjut dan putus sekolah untuk mengakses pendidikan yang bermutu, sementara tunjangan transportasi untuk 2.818 anak perempuan memungkinkan mereka untuk belajar di sekolah menengah pemerintah di dekatnya (United Nations Pakistan 2024, 16). Pada bidang hukum, PBB melakukan peningkatan kapasitas bagi 2.870 petugas peradilan dan penegakan hukum (20% perempuan) membekali mereka untuk memajukan pemberian keadilan yang responsif gender serta meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Basis Data di Balochistan serta basis data untuk Direktorat Reklamasi dan Masa Percobaan Khyber Pakhtunkhwa dengan tujuan agar dapat memungkinkan menganalisis data terkait keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, PBB juga mendirikan Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Gujranwala, Punjab serta asrama perempuan di sekolah tinggi pelatihan polisi di Sindh. PBB juga memberikan konseling karier untuk 218 polisi perempuan di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa dan mendirikan fasilitas penitipan anak di Akademi Peradilan Khyber Pakhtunkhwa (United Nations Pakistan 2024, 17).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Salah satu negara yang memiliki persentase tinggi terhadap isu diskriminasi perempuan di negaranya adalah Pakistan. Berdasarkan *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan World Economic Forum pada tahun 2018 hingga 2022 Pakistan selalu berada di peringkat 2 terbawah dari seluruh negara (World Economic Forum 2023). Pakistan merupakan salah satu negara yang tergabung dalam konsep DaO yang dimiliki PBB. Pilar utama dalam mewujudkan DaO adalah *The One UN Program* yang berfungsi untuk menyatukan sistem PBB di bawah satu strategi bersama pembangunan nasional (United Nations Sustainable Development Group 2014). Pada tahun 2018 hingga 2022, Pakistan melaksanakan UNSDF yang merupakan program perencanaan strategis jangka menengah atau selama 5 tahun dengan tujuan mewujudkan Visi Pakistan 2025 dan SDGs (United Nations Pakistan 2020b). Salah satu hasil yang direncanakan dari UNSDF adalah Gender, Kesetaraan, dan Martabat.

Untuk mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan, PBB menggunakan pendekatan manajerial dalam teori implementasi kebijakan dalam organisasi internasional yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. Berdasarkan pendekatan ini, PBB dalam mengimplementasikan SDGs melalui UNSDF melakukan pemantauan dengan berdasarkan pada laporan rutin yang diberikan oleh negara Pakistan melalui NCSW, laporan berdasarkan inspeksi yang dilakukan PBB dan badan PBB yang berada di Pakistan, yaitu UN Women, dan

laporan NGO yaitu Aurat Foundation. Berdasarkan pendekatan manajerial, PBB dalam mengimplementasikan SDGs melalui UNSDF juga melakukan peran penyelesaian masalah (*problem solving*) serta peningkatan kapasitas (*capacity building*) dengan memberikan rekomendasi dan advokasi berdasarkan saran ahli, pengembangan dan pembentukan undang-undang sebagai bentuk interpretasi aturan, dan pemberian bantuan teknis seperti pelatihan guna meningkatkan kesetaraan gender di Pakistan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9).

Tabel 8. Peran PBB melalui UNSDF dalam Mengupayakan Kesetaraan Gender di Pakistan tahun 2018-2022 melalui Pendekatan Manajerial

Pendekatan	Metode	Aplikasi
Manajerial	*Monitoring* Berdasarkan Laporan Negara	Pemantauan berdasarkan laporan rutin oleh National Commission on the Status of Women (NCSW).
	Monitoring Berdasarkan Inspeksi	Pemantauan program UNSDF dengan melakukan kunjungan lapangan dengan mengirimkan perwakilan dari PBB ke Negara Pakistan kemudian dituangkan menjadi laporan rutin.
	Monitoring Berdasarkan Laporan NGO	Pemantauan berdasarkan laporan rutin Aurat Foundation yang bekerja sama dengan UN Women guna mengetahui kondisi perempuan di Pakistan dan program yang telah dilakukan Aurat Foundation beserta dengan pengaruhnya.
	Capacity Building and Problem Solving melalui Saran Ahli	● Pada tahun 2019, program gabungan global PBB membentuk pedoman *Essential Services Package* (ESP) guna memfasilitasi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

		● Pada tahun 2020 PBB melakukan advokasi dengan anggota parlemen perempuan, anggota partai politik, dan Aliansi untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan terkait penghentian pernikahan anak. Selain itu, Audit Keselamatan Perempuan di Tempat Umum menawarkan rekomendasi berbasis bukti agar keselamatan perempuan di tempat umum dapat terjamin. ● Pada tahun 2021 PBB bersama dengan Pemerintah Pakistan mengumpulkan, menganalisis data, dan memperkuat mekanisme kelembagaan melalui perumusan rencana strategis di Komisi Nasional tentang Status Perempuan serta Kaukus Parlemen Perempuan Federal dan Provinsi. ● Pada tahun 2022 PBB menyediakan data yang dipilah berdasarkan gender untuk memberikan informasi perencanaan dan pemberian layanan.
	Capacity Building and Problem Solving melalui Interpretasi Aturan	● Pada tahun 2018, PBB mengemukakan reformasi pada Pengesahan Undang-Undang Pekerja Rumahan Sindh tahun 2018 yang memperkuat hak, upah, dan jaminan sosial pekerja perempuan di Pakistan. ● Pada tahun 2019 PBB memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pembangunan perempuan di keempat provinsi Pakistan dan melalui UN Women membantu dalam penyusunan kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (GEWE). ● Pada tahun 2020 PBB membantu pemerintah provinsi menyelesaikan dan mengesahkan Kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, lengkap dengan kerangka kerja pelaksanaannya. ● Pada tahun 2021, PBB melakukan pengembangan, pengesahan, serta

		implementasi undang-undang di Pakistan. Beberapa undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Rumahan Khyber Pakhtunkhwa 2021, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Anti-Pemerkosaan (Investigasi dan Pengadilan) 2021. ● Pada tahun 2022 PBB membantu pemerintah provinsi untuk meninjau dan meningkatkan penerapan undang-undang tentang pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan di tempat kerja, hak milik perempuan, dan masa percobaan.
	Capacity Building and Problem Solving melalui Bantuan Teknis	● Pada tahun 2018 PBB mengembangkan Prosedur Operasi Standar dan merancang Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Punjab ● PBB membentuk kampanye *16 Days of Activism against Gender-based Violence* guna mengakhiri pernikahan anak di Pakistan pada tahun 2018. ● PBB bekerja sama dengan Handicap International dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan penyandang disabilitas. ● Melalui kolaborasi, UNOPS dan UN Women menyerahkan 16 bis khusus wanita pada Departemen Transportasi Khyber Pakhtunkhwa pada tahun 2018. Dilanjutkan pada tahun 2019 UN Women menyerahkan 14 bis khusus wanita, 31 halte bis, meluncurkan aplikasi Safe Women agar memungkinkan para perempuan terhindar dari pelecehan seksual. ● UNJP meluncurkan *Essential Services Package* (ESP) ● PBB merancang Pusat Fasilitasi Perempuan dan Remaja di Gujrat. ● Pada tahun 2020 kampanye PBB mengenai kesadaran tentang

		dukungan psikososial dan kekerasan berbasis gender berhasil menjangkau 10,15 juta orang. ● PBB memberikan akses pendidikan melalui Program Pembelajaran Akselerasi (ALP) kepada 215.161 anak yang tidak bersekolah (54% anak perempuan). ● UNJP mengembangkan materi pelatihan dan berhasil melatih lebih dari 600 pejabat penegak hukum terhadap GBV, selain itu UNJP juga memperkuat kapasitas layanan peradilan. ● Pada tahun 2021 PBB membentuk Program Aturan Hukum PBB di Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa ● Pada tahun 2022, Program Pembelajaran Dipercepat yang dimiliki UNICEF membantu 1.185 anak perempuan yang sudah berusia lanjut dan putus sekolah. ● PBB melakukan peningkatan kapasitas bagi 2.870 petugas peradilan dan penegakan hukum (20% perempuan) membekali mereka untuk memajukan pemberian keadilan yang responsif gender.

Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (2018-2022)

Adanya implementasi SDGs melalui UNSDF oleh PBB dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan telah memberikan dampak yang baik bagi negara Pakistan. Sebab banyak kebijakan dan program yang dibentuk melalui UNSDF pada tahun 2018 hingga 2022, seperti pemberian bantuan akses, informasi, pelatihan, dan lain-lain yang sangat membantu perempuan serta anak perempuan di Pakistan dalam memiliki kesetaraan dalam gender dan hidup yang lebih berkualitas.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini penulis menyadari masih ada beberapa hal yang belum terbahas secara sempurna sehingga menjadi kekurangan dan keterbatasan. Pertama, subjek pada penelitian ini adalah PBB sehingga pada penelitian penulis hanya berfokus pada sudut pandang PBB melalui UNSDF dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya, peran organisasi internasional lain dalam mengupayakan kesetaraan gender di Pakistan dapat diteliti. Kedua, penulis pada penelitian ini hanya fokus membahas kesenjangan gender di negara Pakistan yang merupakan salah satu negara DaO. Dengan itu maka penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya meneliti negara lain yang tergabung dalam DaO. Ketiga, pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada isu yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2022, oleh karena itu akan memungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk membahas keterbaruan dari upaya yang dilakukan PBB setelah UNSDF.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Azizah, Nur, and Febri Rahmawati. 2022. "Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan." In Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan, 2:1. 1. https://www.researchgate.net/publication/358634893_Kekerasan_Berbasis_Gender_di_Pakistan.

Bari, Farzana. 2010. "Women Parliamentarians." Gender, Technology and Development 14 (3): 363–84. https://doi.org/10.1177/097185241001400304.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21 (1): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

Hadi, Abdul. 2017. "Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan." European Journal of Social Sciences Education and Research 4 (4): 205–12. https://doi.org/10.26417/ejser.v10i2.p297-304.

Karmaliani, PhD, Rozina, MA Pasha Aneeta, MScN Hirani Saima, MScN Somani Rozina, MScN Hirani Shela, Nargis Asad, BScN Cassum RN ,Laila, and DrPH McFarlane FAAN ,Judith. 2012. "Violence against Women in Pakistan: Contributing Factors and New Interventions." *Issues in Mental Health Nursing* 33 (12): 820–26. https://doi.org/10.3109/01612840.2012.718046.

Kawalo, Monica Putri A. 2019. "Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang." Lex Et Societatis 7 (2). https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24650.

Parveen, Rakhshinda. 2011. "Gender-based violence in Pakistan : a scoping study," January. https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp0141687h49h.

Putu, Nadia Aurelia Tasya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Studi Kasus Honour Killing di Pakistan)." Jurnal Komunitas Yustisia 5 (2): 86–101.

https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51451.

Setyowati, Kinanti Diah Ayu, Andini Aulia Fitriyanti, and Prilla Marsingga. 2024. "Peran UN Women dalam Isu Ketidaksetaraan Gender di Pakistan." BHUVANA: Journal of Global Studies 2 (1): 31–67. https://doi.org/10.59408/bjgs.v2i1.122.

Syed, Naima Tabassum, Tabassum Afzal, and Huma Tabassum. 2015. "Educated People's Perceptions Regarding Causes of Persisting Crime against Women in Pakistani Society." JISR Management and Social Sciences & Economics 13 (1): 29–43.

Buku

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities? Routledge. https://www.routledge.com/International-Organizations-and-Implementation-Enforcers-Managers-Authorities/Joachim-Reinalda-Verbeek/p/book/9780415599665.

Karns, Margaret P., and Karen A. Mingst. 2004. International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance. Lynne Rienner Publishers.

Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. http://eprints.upnyk.ac.id/24095/.

Tabassum, Naima. 2016. Women in Pakistan. Higher Education Commission Pakistan. http://prr.hec.gov.pk/jspui/handle/123456789/28.

Laporan

Aurat Foundation. 2009. "Annual Reports 2006 & 2007." Annual Reports. Strategic Planning, Monitoring & Evaluation Section of Aurat Foundation.

Aurat Foundation. 2018. "Annual Reports 2018." Pakistan: Aurat Foundation. https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report_2018/Annual_Report_%202018.pdf.

Aurat Foundation. 2019. “Annual Reports 2019.” Pakistan: Aurat Foundation. https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report_2019/Annual_Report_2019.pdf

Aurat Foundation. 2020. “Annual Reports 2020.” Pakistan: Aurat Foundation. https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report_2020/Annual%20Report%202020.pdf.

Aurat Foundation. 2021. “Annual Reports 2021.” Pakistan: Aurat Foundation. https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report_2021/Annual%20Report%202021.pdf.

Aurat Foundation. 2022. “Annual Reports 2022.” Pakistan: Aurat Foundation. https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report_2022/Annual%20Report%202022.pdf.

Ministry of Planning, Development & Special Initiatives. n.d. “Pakistan Vision 2025.” Pakistan: Ministry of Planning,Development & Special Initiatives. https://www.pc.gov.pk/uploads/vision2025/Pakistan-Vision-2025.pdf.

Multi-Partner Trust Fund Office. 2019. “Final Narrative Report of the Pakistan One Fund - Pakistan One UN Programme II 2013-2017 and One UN Programme III 2018.” https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/2022-06/20190722_final_narrative_report_2013-17_pakistan_of.pdf?_gl=1*62bdqy*_gcl_au*ODk1NDE0MjE4LjE3MzY5Njc0NTg.*_ga*MTc3NTQ4ODEzMS4xNzAxNDE3NzUx*_ga_3W7LPK0WP1*MTczNjk2NzQ1OC4xMi4xLjE3MzY5NjkwNjguNjAuMC4w.

National Commission on the Status of Women. 2019. “Annual Report 2018-2019.” Pakistan: National Commission on the Status of Women. https://drive.google.com/file/d/1NiBVcPcfPT3xH6fY1IZ3Ps6uFALIpyJ3/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

National Commission on the Status of Women. 2022. “Annual Report 2021-2022.” Pakistan: National Commission on the Status of Women. https://drive.google.com/file/d/1kSaLeynqIrj5TcHsKrsbdXdEJORWSyeS/view.

National Commission on the Status of Women. 2023. “Annual Report 2022-2023.” Pakistan: National Commission on the Status of Women. https://drive.google.com/file/d/1yBBDY1ph-48L3MS4VswEcqt_MlRA6ez1/view?usp=embed_facebook.

National Institute of Population Studies and ICF. 2019. “Pakistan Demographic and Health Survey 2017-18,” January. https://dhsprogram.com/publications/publication-fr354-dhs-final-reports.cfm.

Pakistan. n.d. “Chapter 2: ‘Majlis-e-Shoora (Parliament)’ of Part III: ‘The Federation of Pakistan.’” Part III: The Federation of Pakistan. Accessed March 14, 2025. https://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part3.ch2.html.

Pakistan Institute of Education. 2022a. Pakistan Education Statistics 2018-19. National Education Management Information System (NEMIS), Pakistan Institute of Education (PIE), Ministry of Federal Education & Professional Training.

Pakistan Institute of Education. 2022b. Pakistan Education Statistics 2019-20. National Education Management Information System (NEMIS), Pakistan Institute of Education (PIE), Ministry of Federal Education & Professional Training.

Pakistan Institute of Education. 2022c. Pakistan Education Statistics 2020-21. National Education Management Information System (NEMIS), Pakistan Institute of Education (PIE), Ministry of Federal Education & Professional Training.

Pakistan Institute of Education. 2024. Pakistan Education Statistics 2021-22. National Education Management Information System (NEMIS), Pakistan Institute of Education (PIE), Ministry of Federal Education & Professional Training.

Sustainable Social Development Organisation. 2020. “Tracking Numbers State of Violence Against Women and Children.” https://res.cloudinary.com/dct4km8qs/image/upload/v1676526499/03_Media_Tracking_Report_2020_PDF_af58096357.pdf.

Sustainable Social Development Organisation. 2021. “Tracking Numbers: State of Violence Against Women & Children.” https://res.cloudinary.com/dct4km8qs/image/upload/v1681111604/Tracking_Numbers_State_of_Violence_against_Women_and_Children_opt_157be66fcf.pdf.

United Nations. 2006. “Note by the Secretary-General.” United Nations. https://docs.un.org/en/A/61/583.

United Nations Development Programme. 2013. “One United Nations Programme II (2013 - 2017).” United Nations Pakistan. www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/pk/47422cba83d8a937319e18b0f8d17f992a8f7ac1fde1c6b1e3b1474b805447a7.pdf.

United Nations Pakistan. 2004. “One UN Program in Pakistan.” Pakistan: United Nations Pakistan. https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/02/Pakistan_UNDAF_One_Program_2009-2012.pdf.

United Nations Pakistan. 2014. “One UN Programme I Final Report.” Pakistan: United Nations Pakistan. https://mptf.undp.org/sites/default/files/documents/20000/one_un_programme_i_2009_2013_final_report.pdf.

United Nations Pakistan. 2019. “One UN Programme III - Pakistan Annual Report 2018 | United Nations in Pakistan.” United Nations Pakistan. https://pakistan.un.org/en/45352-one-un-programme-iii-pakistan-annual-report-2018.

United Nations Pakistan. 2020a. “One UN Pakistan : Annual Report 2019 | United Nations in Pakistan.” United Nations Pakistan. https://pakistan.un.org/en/86386-one-un-pakistan-annual-report-2019.

United Nations Pakistan. 2020b. “UN Sustainable Development Framework (2018 - 2022).” https://pakistan.un.org/en/44136-un-sustainable-development-framework-2018-2022.

United Nations Pakistan. 2021. “One UN Pakistan : Annual Report 2020 | United Nations in Pakistan.” United Nations Pakistan. https://pakistan.un.org/en/124792-one-un-pakistan-annual-report-2020.

United Nations Pakistan. 2022. “One UN Pakistan : Annual Report 2021 | United Nations in Pakistan.” United Nations Pakistan. https://pakistan.un.org/sites/default/files/2022-09/OneUNReport2021.pdf.

United Nations Pakistan. 2024. “One UN Pakistan : Annual Report 2022 | United Nations in Pakistan.” United Nations Pakistan. https://pakistan.un.org/en/270913-annual-report-2022.

United Nations Sustainable Development Group. 2009. “Delivering as One Presentation Speaking Notes.” https://web.archive.org/web/20110612080457/http://www.undg.org/docs/9985/Delivering-as-One-Sept2009-notes_DUP_09-14-2009_10-42-11-334_AM.pdf.

United Nations Sustainable Development Group. 2014. “One Programme - Tools and Materials.” https://unsdg.un.org/resources/one-programme-tools-and-materials.

UN Women Pakistan. 2020. “Provincial Gender Equality/Women’s Empowerment Policies and Gender-Responsive Budgeting.” https://pakistan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/01/provincial-gender-equality-womens-empowerment-policies-and-gender-responsive-budgeting.

World Bank Open Data. n.d.-a. “Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15-64) (Modeled ILO Estimate) - Pakistan.” Accessed January 26, 2025. https://data.worldbank.org.

World Bank Open Data. n.d.-b. “Maternal Mortality Ratio (Modeled Estimate, per 100,000 Live Births) - Pakistan.” Accessed January 29, 2025. https://data.worldbank.org.

World Bank Open Data. n.d.-c. “Proportion of Seats Held by Women in National Parliaments (%) - Pakistan.” Accessed January 27, 2025. https://data.worldbank.org.

World Bank Open Data. n.d.-d. “Proportion of Women in Ministerial Level Positions (%).” Accessed January 28, 2025. https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/sg-gen-mnst-zs.

World Bank Open Data. n.d.-e. “Unemployment, Female (% of Female Labor Force) (Modeled ILO Estimate) - Pakistan.” Accessed January 26, 2025. https://data.worldbank.org.

World Economic Forum. 2012. “The Global Gender Gap Report 2012.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2012/.

World Economic Forum. 2013. “The Global Gender Gap Report 2013.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2013/.

World Economic Forum. 2014. “Global Gender Gap Report 2014.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2014/.

World Economic Forum. 2015. “Global Gender Gap Report 2015.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2015/.

World Economic Forum. 2016. “The Global Gender Gap Report 2016.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/the-global-gender-gap-report-2016/

World Economic Forum. 2017. “The Global Gender Gap Report 2017.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/the-global-gender-gap-report-2017/

World Economic Forum. 2018. “Global Gender Gap Report 2018.” https://www.weforum.org/publications/the-global-gender-gap-report-2018/

World Economic Forum. 2019. “Global Gender Gap Report 2020.” World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality/.

World Economic Forum. 2021. “Global Gender Gap Report 2021.” https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2021/.

World Economic Forum. 2022. “Global Gender Gap Report 2022.” https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/.

Artikel Daring

Abbas, Anam. 2018. "Access to Training and Technology Can Help Pakistan's Rural Women, UN Women Study Says." UN Women – Pakistan. July 19, 2018. https://pakistan.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/08/access-to-training-and-technology-can-help-pakistans-rural-women.

Abbas, Anam. 2018. "Radio and Volunteerism Empowers Marginalized Women in Remote Communities of Pakistan." UN Women – Pakistan. January 23, 2018. https://pakistan.unwomen.org/en/news-and events/stories/2018/04/radio-and-volunteerism-empowers-marginalized-women.

Abbas, Anam. 2021. "Making Public Spaces Safer for Women by Improving Public Awareness: A Joint Effort in Khyber Pakhtunkhwa by UN Women and the Local Ombudsperson." UN Women – Pakistan. May 18, 2021. https://pakistan.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/making-public-spaces-safer-for-women.

Aftab, Anum. 2022. "Women as Active Agents of Peace: Inspiring Voices from Pakistan." UN Women – Pakistan. May 24, 2022. https://pakistan.unwomen.org/en/stories/feature-story/2022/05/inspiring-voices-from-pakistan.

Hussain, Abid. 2023. "Pakistani Girl Killed after Photos with Boy's Arm around Her Go Viral." Al Jazeera. November 30, 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/30/pakistani-girl-killed-after-photos-with-boys-arm-around-her-go-viral.

Junaidi, Ikram. 2024. "Over 41pc Pakistani Women Suffer from Anaemia: Report." DAWN.COM. August 28, 2024. https://www.dawn.com/news/1855195

Kashif, Jawaria Arzoo. 2024. "An Overview of Gender Based Violence in Pakistan." Kitakyushu Forum on Asian Women, May 2024, 102 edition. https://www.kfaw.or.jp/wpcontent/uploads/2024/05/dbc6167beef5922ecc76365c858b3d06-2.pdf.

Khan, S. 2023. “What’s behind Pakistan’s Family Planning Stigma?” Dw.Com. March 4, 2023. https://www.dw.com/en/whats-behind-pakistans-family-planning-stigma/a-65216524.

Pasha, Anum, Saman Ahsan, and Habib Asgher. 2019. “In Digital Campaign, UN Women Hits Back at the Scourge of Dowry in Pakistan.” UN Women – Pakistan. November 8, 2019. https://pakistan.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/11/un-women-hits-back-at-the-scourge-of-dowry-in-pakistan.

Pasha, Anum, Saman Ahsan, and Habib Asgher. 2020. “Supporting Women Survivors of GBV to Obtain Services and Access Justice.” UN Women – Pakistan. January 28, 2020. https://pakistan.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/01/supporting-women-survivors-of-gbv.

Shahid, Jamal. 2022. “Over 60,000 Cases of Violence against Women Registered in Last Three Years, NA Told.” DAWN.COM. October 20, 2022. https://www.dawn.com/news/1715929.

Website

Aurat Foundation. n.d. “About Aurat Foundation.” Accessed February 11, 2025. https://www.af.org.pk/about.php.

International Labour Organization. 2010. “Gender Equality for Decent Employment in Pakistan | International Labour Organization.” May 25, 2010. https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/gender-equality-decent-employment-pakistan.

National Commission on the Status of Women. n.d.-a. “About Us.” Accessed February 9, 2025. https://ncsw.gov.pk/Overview.

National Commission on the Status of Women. n.d. “Annual Reports.” Accessed February 9, 2025. https://ncsw.gov.pk/Detail/NTU0ODI5ZWEtNGQ0Mi00MmQyLWJlODktN2ZmOWVjMzZhYTQz.

The World Bank. 2024. “Five Major Challenges to Girls’ Education in Pakistan.” June 2024. https://datatopics.worldbank.org/dataviz/girls-education-pakistan/.

United Nations Pakistan. n.d. “The United Nations in Pakistan | United Nations in Pakistan.” Accessed January 14, 2025.

World Economic Forum. 2023. “Reports.” World Economic Forum. June 20, 2023.